

LAPORAN KINERJA



**TRIWULAN
II TAHUN 2025**

Balai Besar POM di Pontianak



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2025 Balai Besar POM di Pontianak dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja Interim Balai Besar POM di Pontianak disusun dalam rangka menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dikenal dengan *Good governance* dan *Clean goverment* yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang merupakan instansi induk Balai Besar POM di Pontianak, kepada masyarakat dan *stakeholders*.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Besar POM di Pontianak sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI telah berupaya melaksanakan visi yaitu “Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Untuk mewujudkan visi Badan POM tersebut, telah ditetapkan misi yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025-2029. Tahun 2025 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis tersebut.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Sasaran Kinerja tahun 2025 yang tercantum dalam Renstra 2025-2029, maka disusun





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2025 Balai Besar POM di Pontianak berisi penjelasan kemajuan pencapaian target kinerja berdasarkan evaluasi berbagai kegiatan baik keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi, dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2025 Balai Besar POM di Pontianak tertuang isu strategis yang sedang dihadapi saat ini, pengukuran capaian kinerja dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target triwulan II Tahun 2025, membandingkan antara realisasi kinerja dengan target akhir tahun 2025, serta evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran. Disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi, dan tujuan Badan POM juga sebagai upaya memperbaiki kinerja di triwulan selanjutnya.

Dengan berkembangnya teknologi saat ini banyak cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh Obat dan Makanan yang dibutuhkan, selain itu juga pelaku usaha berlomba untuk memproduksi dan mendistribusikan Obat dan Makanan ke seluruh wilayah di Indonesia. Balai Besar POM di Pontianak terus berupaya dan berinovasi sehingga kinerja pengawasan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang Obat dan Makanan tetap optimal.

Upaya tersebut tercermin dari program dan kegiatan yang seluruhnya mendukung sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat pada Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh telah mencapai kategori Istimewa. Tugas dan tanggung jawab pengawasan yang harus dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak semakin luas, kompleks dengan perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis dan tidak dapat diprediksi. Untuk itu diperlukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, yang terus dikembangkan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi terlaksananya tugas dan tanggung jawab Balai





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



Besar POM di Pontianak. Diharapkan dengan tersusunnya laporan kinerja ini dapat menjadi pertanggungjawaban Balai Besar POM di Pontianak dan memberikan sumbangsih bagi peningkatan kinerja di triwulan selanjutnya.

Pontianak, 20 Juli 2025

Kepala Balai Besar POM di Pontianak



Fauzi Ferdiansyah, S.Si., Apt.





EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Interim ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*), di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan upaya untuk memperbaiki kinerja di triwulan mendatang. Untuk mencapai tujuan Balai Besar POM di Pontianak tahun 2025-2029, dalam dokumen Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2025 Balai Besar POM di Pontianak telah ditetapkan 25 indikator kegiatan dengan masing-masing capaian sebagai berikut :

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 114,20% **(110%)** kategori **Sangat Baik**,
2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 115,93% **(110%)** kategori **Sangat Baik**,
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar, tidak masuk dalam perhitungan TW II karena tidak ada sampel KLB,
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **106,69%** kategori **Sangat Baik**,
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*, dengan capaian **106,45%** kategori **Sangat Baik**,
7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 116,28% **(110%)** kategori **Sangat Baik**,
8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **109,80%** kategori **Sangat Baik**,
9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **106,24%** kategori **Sangat Baik**,
10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 115,59% **(110%)** kategori **Sangat Baik**,





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, dengan capaian 118,32% (**110%**) kategori **Sangat Baik**,
12. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,
13. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, dengan capaian **100,42%** kategori **Sangat Baik**,
14. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, dengan capaian **102,45%** kategori **Sangat Baik**,
15. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,
16. Jumlah desa pangan aman, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,
17. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,
18. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan, dengan capaian **101,11%** kategori **Sangat Baik**,
19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT, dengan capaian 113,04% (**110%**) kategori **Sangat Baik**,
20. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,
21. Indeks Pelayanan Publik UPT, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
22. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
23. Nilai AKIP UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
24. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
25. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun.

Dari 25 indikator kegiatan, sebanyak 18 indikator kegiatan yang dapat diperhitungkan untuk menentukan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada Triwulan II 2025. Adapun capaian Nilai Kinerja Organisasi Balai Besar POM di Pontianak periode Triwulan II sebesar **105,18** dengan predikat **Istimewa**.

Pada bulan Maret 2025 anggaran Balai Besar POM di Pontianak mengalami pemotongan sehingga anggaran yang tersisa sebanyak Rp. 29.962.179.000 dari anggaran awal sebesar Rp. 30.625.979.000. Penyerapan anggaran pada triwulan II



LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



tahun 2025 adalah sebesar Rp7,008,624,825,- (**23,39%**) dari Pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 29.962.179.000,-. Realisasi anggaran triwulan II tahun 2025 ini masih memerlukan perbaikan terutama dalam penyesuaian dengan RPD yang telah ditetapkan agar kedepannya tidak terjadi deviasi yang sangat tinggi. Berdasarkan analisis efisiensi kegiatan, Indeks Efisiensi seluruh indikator kinerja kegiatan berada indeks efisiensi rerata (IE) 1,16 dan Tingkat Efisiensi rerata (TE) 0,16. Suatu capaian sasaran kegiatan dikatakan efisien apabila nilai $IE \geq 1,00$. Dari nilai IE tersebut, Balai Besar POM di Pontianak berhasil melaksanakan sasaran kegiatan dengan Efisien. Namun demikian masih perlu upaya perbaikan mulai dari perencanaan yang matang, monitoring dan evaluasi secara konsisten serta pengendalian internal untuk penyempurnaan capaian yang lebih efisien dan efektif.

Seiring dengan hasil pencapaian kinerja triwulan II tahun 2025, Balai Besar POM di Pontianak berupaya melakukan perbaikan secara terus-menerus dalam rangka meningkatkan kinerja di triwulan yang akan datang, sehingga dapat tercipta manajemen kinerja pemerintahan yang berorientasi hasil, melalui :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan proses penerapan Zona Integritas untuk mewujudkan Balai Besar POM di Pontianak menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
2. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, dan Tanpa Izin Edar (TIE) melalui kegiatan rutin pengawasan dan penindakan serta kerjasama dengan lintas sektor.
3. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor melalui penandatanganan MoU/Perjanjian Kerjasama maupun komunikasi/koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), Komando Daerah Militer XII Tanjungpura, Universitas Tanjungpura, Badan Intelijen Daerah Kalimantan Barat, Ombudsman Kalimantan Barat, Organisasi Profesi PD IAI Kalimantan Barat, Organisasi Profesi PD PAFI Kalimantan Barat, Universitas Tanjungpura, Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura, Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjungpura, Universitas Muhammadiyah





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



Pontianak, Politeknik Negeri Pontianak, Politeknik Kesehatan Pontianak, Persaudaraan Muslimah Kalimantan Barat, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Pontianak, Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kubu Raya dan Mal Pelayanan Publik Kota Pontianak. Yang tidak kalah pentingnya adalah dilakukan evaluasi terhadap hubungan kerjasama yang terjalin supaya semakin efektif meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Barat.

4. Konsistensi penerapan Sistem Manajemen Mutu dengan integrasi ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017.
5. Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 sebagai bentuk komitmen anti segala bentuk praktik penyuapan.
6. Peningkatan ruang lingkup pengujian laboratorium dan kompetensi analis sebagai salah satu pilar utama pengawasan obat dan makanan di Kalimantan Barat.
7. Pencegahan kejahatan Obat dan Makanan melalui penggalangan yang bertujuan untuk menggalang pemangku kepentingan dalam rangka intervensi pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, antara lain melalui Focus Group Discussion (FGD), inisiasi Perjanjian Kerja Sama (PKS/MoU), peningkatan kompetensi, koordinasi, KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi), dan lain-lain.
8. Pelaksanaan Program Desa Pangan Aman mengikuti kebijakan Pemerintah dalam rangka percepatan penurunan stunting.





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
EXECUTIVE SUMMARY	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	2
1.3 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Pontianak	14
1.4 Isu Strategis.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
2.1 Rencana Strategis.....	22
2.2 Visi, Misi, Dan Tujuan.....	23
2.3 Budaya Organisasi.....	34
2.4 Sasaran Kegiatan.....	35
2.5 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	42
2.6 Perjanjian Kinerja.....	45
2.7 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)	47
2.8 Kategori Pencapaian Indikator.....	49
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	53
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	53
3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi.....	151
3.3 Realisasi Anggaran.....	177
3.4 Analisis Capaian Kinerja Loka POM Kabupaten Sambas	186
BAB IV PENUTUP	201
4.1 Kesimpulan.....	201
4.2 Saran.....	204
Lampiran	208





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2.1.	Peta Wilayah Kerja Balai Besar POM di Pontianak	8
Gambar 1.3.1.	Struktur Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	16
Gambar 2.2.1.	Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)	26





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.2.1. Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak.....14





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



DAFTAR TABEL

Tabel 1.2.1.	Kendaraan Dinas di Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025	10
Tabel 1.2.2.	Presentase Pegawai Berdasarkan Pemenuhan ABK	12
Tabel 1.2.3.	Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak	13
Tabel 1.2.4.	Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak Berdasarkan Gender	14
Tabel 2.2.1.	SWOT BBPOM di Pontianak	32
Tabel 2.4.1.	Matriks Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025-2029	35
Tabel 2.5.1.	Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025	43
Tabel 2.6.1.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak	45
Tabel 2.7.1.	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Balai Besar POM di Pontianak	48
Tabel 2.8.1.	Kategori Pencapaian Indikator	50
Tabel 2.8.2.	Kategori Pencapaian NKO	52
Tabel 3.1.1.	Kategori Capaian Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Triwulan II Tahun 2025	54
Tabel 3.1.2.	Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	58
Tabel 3.1.3.	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya	58
Tabel 3.1.4.	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II dengan Target Tahun 2025	59
Tabel 3.1.5.	Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan oleh Balai Besar POM di Pontianak Triwulan II Tahun 2025	63
Tabel 3.1.6.	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya	64
Tabel 3.1.7.	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II dengan Target Tahun 2025	65





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



Tabel 3.1.8.	Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2025	69
Tabel 3.1.9.	Perbandingan Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan sebelumnya	69
Tabel 3.1.10.	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II dengan Target Tahun 2025	70
Tabel 3.1.11.	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder Triwulan II Tahun 2025	73
Tabel 3.1.12.	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya	73
Tabel 3.1.13.	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder Triwulan II dengan Target Tahun 2025	74
Tabel 3.1.14.	Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II Tahun 2025	78
Tabel 3.1.15.	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya	78
Tabel 3.1.16.	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025	79
Tabel 3.1.17	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	80
Tabel 3.1.18.	Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2025	82
Tabel 3.1.19.	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang	82





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



	diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya	
Tabel 3.1.20.	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025	83
Tabel 3.1.21.	Perbandingan Target dan Realisasi Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2025	88
Tabel 3.1.22.	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya	89
Tabel 3.1.23.	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025	89
Tabel 3.1.24.	Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan Triwulan II Tahun 2025.	93
Tabel 3.1.25.	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya	93
Tabel 3.1.26.	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan Triwulan II dengan Target Tahun 2025	94
Tabel 3.1.27.	Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan Triwulan II Tahun 2025	98
Tabel 3.1.28.	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya	98
Tabel 3.1.29.	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan Triwulan II dengan Target Tahun 2025	99
Tabel 3.1.30.	Perbandingan Target dan Realisasi Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2025	102
Tabel 3.1.31.	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan	102





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



	ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya	
Tabel 3.1.32.	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II dengan Target Tahun 2025	103
Tabel 3.1. 33	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Internal Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	105
Tabel 3.1. 34	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan Triwulan Sebelumnya	106
Tabel 3.1. 35	Perbandingan Realisasi Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Triwulan II dengan Target Tahun 2025	107
Tabel 3.1.36.	Kategori Tingkat Efektivitas KIE	110
Tabel 3.1.37.	Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	110
Tabel 3.1.38.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya	111
Tabel 3.1.39.	Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	111
Tabel 3.1.40.	Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Tahapan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	114
Tabel 3.1.41.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahapan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya	114
Tabel 3.1.42.	Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Tahapan Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	115
Tabel 3.1.43.	Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman	117
Tabel 3.1.44.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahapan Desa Pangan Aman Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya	118
Tabel 3.1.45.	Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman	118





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



Tabel 3.1.46.	Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2025	121
Tabel 3.1.47.	Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya	121
Tabel 3.1.48.	Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2025	122
Tabel 3.1.49.	Perbandingan Target dan Realisasi Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan Triwulan II Tahun 2025	129
Tabel 3.1.50.	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya	129
Tabel 3.1.51.	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan Triwulan II dengan Target Tahun 2025	130
Tabel 3.1.52.	Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2025	133
Tabel 3.1.53.	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya	134
Tabel 3.1.54.	Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2025	134
Tabel 3.1.55.	Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2025	139
Tabel 3.1.56.	Perbandingan Realisasi Kinerja persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya	139
Tabel 3.1.57.	Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2025	140
Tabel 3.2.1.	Profil Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak triwulan II tahun 2025	178





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Memasuki periode penting dalam arah pembangunan nasional, Indonesia mengawali fase baru pembangunan yang semakin dekat dengan Indonesia Emas 2045. Periode tersebut ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025 – 2045 untuk mewujudkan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia sebagai NKRI yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan Visi tersebut, RPJPN 2025-2045 menggarisbawahi pentingnya transformasi yang menyeluruh di berbagai sektor, mencakup transformasi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, transformasi ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan, serta transformasi tata kelola yang memastikan pemerintahan yang efisien, efektif, dan bebas dari korupsi. Dengan fokus pada pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas, sarana dan prasarana yang ramah lingkungan, serta kesinambungan pembangunan, RPJPN menjanjikan langkah konkret menuju terwujudnya Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

Dalam RPJPN 2025-2045, BPOM khususnya mendukung Kebijakan Transformasi Sosial Kesehatan Untuk Semua, yaitu pembangunan kesehatan yang bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun Perempuan. Dalam kebijakan tersebut, penguatan sistem pengawasan obat dan makanan





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



dengan perluasan cakupan produk termasuk pengawasan siber dan farmakovigilans menjadi salah satu strategi yang difokuskan dalam mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif.

RPJPN 2025 – 2045 tidak hanya mencerminkan aspirasi dan harapan kolektif bangsa tetapi juga menetapkan milestones jelas yang harus dicapai dalam periode jangka menengah pertama, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029. Hal ini menegaskan komitmen Indonesia dalam melangkah secara strategis dan terarah, memastikan setiap tahapan pembangunan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai transformasi yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.

1.2.GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Badan POM menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, Badan POM menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



- 3) Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
- 4) Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
- 5) Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
- 6) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 7) Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 8) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
- 9) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
- 10) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
- 11) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, Badan POM mempunyai kewenangan, yaitu:

- 1) Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



Badan POM melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan sejak sebelum beredar sampai selama beredar (*pre* dan *post market*). Pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan. Sedangkan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

1.2.1. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak

Balai Besar POM di Pontianak merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM. Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, UPT Badan POM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terdapat 14 (empat belas) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. UPT Badan POM yang berada di Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari Balai Besar POM di Pontianak, Loka POM di Kabupaten Sanggau, dan Loka POM di Kabupaten Sambas. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, wilayah kerja pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak meliputi 7 (tujuh) kabupaten/kota yaitu Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, Kota Singkawang, Kabupaten Landak, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kayong Utara,





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Pontianak memiliki fungsi:

- 1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 2) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- 3) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- 4) Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- 5) Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- 6) Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- 7) Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- 8) Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- 9) Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 10) Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- 11) Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 12) Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- 13) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 14) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- 15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan POM.





1.2.1.1 Lingkungan Eksternal

Provinsi Kalimantan Barat yang sebagian besar terdiri dari dataran rendah dengan luas 146.807 km², kurang lebih 7,53 persen dari luas wilayah Indonesia atau 1,13 kali dari luas pulau Jawa. Memiliki garis lintas batas darat sekitar 1.020,66 km² dan garis lintas laut sekitar 900 km². Provinsi ini memiliki 14 kabupaten/kota yang terdiri dari 2 kota dan 12 kabupaten. Sebagian besar transportasi ke Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dilakukan dengan transportasi darat. Transportasi udara dilakukan pada wilayah yang tidak dapat dicapai dengan transportasi darat atau memerlukan waktu yang lama bila melalui transportasi darat, antara lain Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Sedangkan kabupaten/kota lainnya ditempuh dengan transportasi darat. Waktu tempuh untuk sampai ke wilayah kerja di tiap-tiap kabupaten/kota berbeda-beda. Estimasi rincian waktu tempuh dari Kota Pontianak (ibukota Provinsi Kalimantan Barat) ke kabupaten/kota yang lain secara umum (dengan catatan tidak ada kerusakan jalan) adalah sebagai berikut :

a.	Kota Singkawang	± 4 jam (± 152 km)
b.	Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten terdekat dengan Kota Pontianak (rata-rata waktu tempuh 1 jam), beberapa kecamatan ditempuh menggunakan transportasi air sekitar 3-4 jam.
c.	Kabupaten Mempawah	± 2 jam (± 75 km)
d.	Kabupaten Bengkayang	± 5 jam (± 160 km)
e.	Kabupaten Sambas	± 6 jam (± 225 km)
f.	Kabupaten Landak	± 4 jam (± 163 km)
g.	Kabupaten Sanggau	± 5 jam (± 186 km)
h.	Kabupaten Sekadau	± 7 jam (± 273 km)





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



i.	Kabupaten Sintang	± 8 jam (± 332 km), atau 40 menit melalui jalur udara
j.	Kabupaten Melawi	± 9 jam (± 440 km), atau jalur udara ke Kabupaten Sintang kemudian dilanjutkan jalur darat ke Kabupaten Melawi 2 jam (± 90 km)
k.	Kabupaten Kapuas Hulu	± 15 jam (sekitar 780 km), atau 70 menit melalui jalur udara
l.	Kabupaten Ketapang	± 12 jam (± 458 km), atau 40 menit melalui jalur udara
m.	Kabupaten Kayong Utara	± 13 jam (± 540 km), atau jalur udara melalui Ketapang ± 40 menit, dan dilanjutkan 2 jam jalur darat ke Kayong (± 90 km)

Kondisi geografis Kalimantan Barat yang berbatasan darat dengan Malaysia Timur yaitu Negara Bagian Serawak menjadi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan terutama masuknya produk Obat dan Makanan dari luar negeri yang tidak memiliki izin edar. Ada 5 (lima) wilayah di Kalimantan Barat yang berbatasan darat dengan negara Malaysia yaitu Entikong (Kabupaten Sanggau), Aruk (Kabupaten Sambas), Jagoi Babang (Kabupaten Bengkayang), Jasa (Kabupaten Sintang) dan Nanga Badau (Kabupaten Kapuas Hulu). Namun baru 3 (tiga) PLBN (Pos Lintas Batas Negara) yang beroperasi resmi, yaitu PLBN Entikong, Badau dan Aruk. Disinyalir terdapat lintas batas tidak resmi yang merupakan jalan-jalan kecil yang jumlahnya jauh lebih banyak. Hal ini sangat memungkinkan terjadinya praktek perdagangan ilegal melalui peredaran produk tidak memenuhi ketentuan seperti Obat dan Makanan tidak memiliki izin edar dan/atau mengandung bahan berbahaya atau bahan kimia obat, sehingga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.

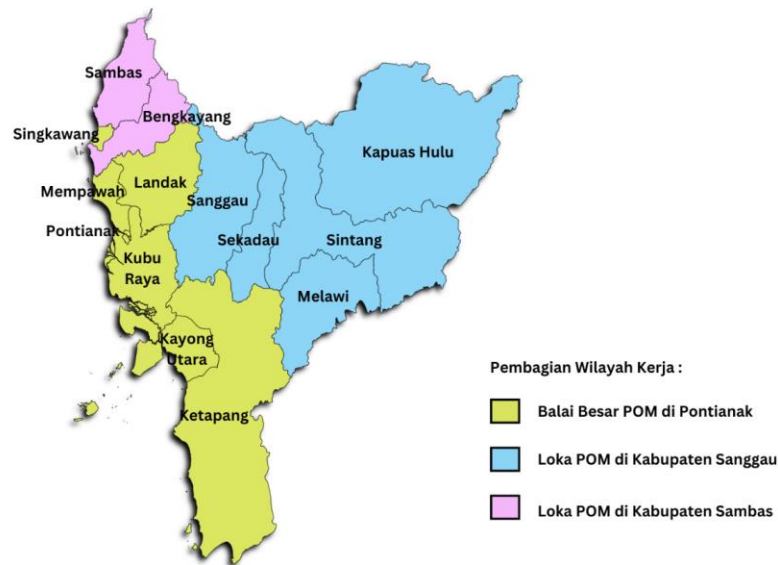




LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



Gambar 1.2.1. Peta Wilayah Kerja Balai Besar POM di Pontianak

1.2.1.2. Lingkungan Internal

1) Infrastruktur, Sarana dan Prasarana

a. Luas Tanah (m²)

- Kantor Balai Besar POM di Pontianak terletak di Jl. Dr. Soedarso Pontianak diatas tanah seluas 3.000 m².
- Pos POM Aruk terletak di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas di atas tanah seluas 3.533 m².
- Rumah Negara Golongan I terletak di Jl. dr. Wahidin Gg. Sepakat VI di atas tanah seluas 788 m².
- Loka POM di Kabupaten Sambas terletak di Jl. Pembangunan, Dalam Kaum, Kab. Sambas di atas tanah seluas 2.659 m².

b. Luas Bangunan (m²)

- Balai Besar POM di Pontianak menempati bangunan dengan berlantai dua seluas 3.157 m².
- Luas Bangunan Pos POM Aruk adalah 400 m².





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



c. Status Kepemilikan Tanah

- Tanah tempat berdirinya gedung Balai Besar POM di Pontianak adalah hak pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan POM RI Sertifikat No. 19 tanggal 26 Juni 2012.
- Tanah Pos POM Aruk di Sambas adalah hak pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan POM RI Sertifikat No. 31 tanggal 23 Desember 2019.
- Tanah Rumah Negara Golongan I adalah hak pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan POM RI Sertifikat No. 19 tanggal 26 Juni 2012.
- Tanah Loka POM di Kabupaten Sambas adalah hak pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan POM RI Sertifikat No. 138/Dalam Kaum tanggal 31 Juli 2024.

d. Rumah Dinas

Rumah Dinas Jl. dr. Wahidin Gg. Sepakat VI sudah dilakukan penghapusan Rumah Negara Gol I Tipe B Permanen atas lelang 1 (satu) unit bongkaran rumah Negara golongan 1 tipe B permanen dalam keadaan rusak berat, sebesar Rp 5.777.000,00, dengan Risalah Lelang No : 343/53/2023 tanggal 05 Juni 2023, NTPN : 15F410N9VR8V5GOA tanggal 06 Juni 2023 dan Surat Keputusan Kepala Balai Besar POM di Pontianak tentang Penghapusan BMN berupa Rumah Negara Gol I Tipe B nomor PL.03.09.20A.20A5.06.23.121 tanggal 15 Juni 2023.

e. Penerangan

- Penerangan yang digunakan gedung Balai Besar POM di Pontianak menggunakan jasa PLN dengan kapasitas :
- PLN : 82,5 kVA dan 82,5 kVA
- Generator Set : 100 kVA dan 150 kVA

f. Sarana Komunikasi





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



Untuk kelancaran komunikasi sarana yang tersedia di kantor Balai Besar POM Pontianak adalah :

Nomor Telepon	0561-572417 (Ruang Staf Infokom) 0561-743858 (Ruang Kepala Balai) 0561-737720 (Lobby BBPOM di Pontianak)
Alamat e-mail	bpom_pontianak@pom.go.id balaipom_pontianak@yahoo.com
Handphone	0822 5547 0600 (Informasi dan Pengaduan Masyarakat) 0822 5547 0601 (Pengujian Obat dan makanan) 0822 5547 0602 (Sertifikasi /Registrasi/Penerbitaan SKI/SKE)
Sosial Media	bpom.pontianak (Instagram) Balai Besar POM di Pontianak (Facebook) @BPOMPontianak (Twitter) Balai Besar POM di Pontianak (Youtube)
Subsite	pontianak.pom.go.id

g. Sumber Air

Sumber air yang digunakan di Balai Besar POM di Pontianak berasal dari PDAM.

h. Kendaraan

Kendaraan yang digunakan di Balai Besar POM Pontianak tercantum pada tabel 1.2.1 berikut :

Tabel 1.2. 1 Kendaraan Dinas di Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2023





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



No.	Jenis Kendaraan	Nomor Polisi	Merk	Type	Tahun	Kondisi	Unit Pengguna
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	KB1519QP	Mitsubishi	Outlander Sport	2015	Baik	BBPOM Pontianak
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	KB1425WO	Toyota	Kijang Innova 2.0 G M/T	2018	Baik	BBPOM Pontianak
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	B9065PQWI	Isuzu	NHR /Penyidikan	2018	Baik	BBPOM Pontianak
4	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	B9196PQE	Isuzu	NHR / Incenerator	2019	Baik	BBPOM Pontianak
5	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	KB1914WS	Toyota	Rush	2020	Baik	BBPOM Pontianak
6	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	KB9674WW	Isuzu, ELF, NHR 5SE	ELF, NHR 55E	2013	Baik	BBPOM Pontianak
7	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	KB8676AU	Mitsubishi	Triton 2,5L SC HDX	2017	Baik	BBPOM Pontianak
8	Sepeda Motor	KB5044W	Honda NF 125 SD	Honda NF 125 SD	2007	Baik	BBPOM Pontianak
9	Sepeda Motor	KB5045W	Honda NF 125 SD	Honda NF 125 SD	2007	Baik	BBPOM Pontianak

2) Sumber Daya Manusia

Dalam penyelenggaraan tugasnya, terdapat sebanyak tujuh puluh enam (76) orang pegawai pada Balai Besar POM di Pontianak dan dua puluh (20) orang





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



pegawai pada Loka POM di Kab. Sambas dengan pembagian jabatan sebagai berikut:

Tabel 1.2. 2 Presentase Pegawai Berdasarkan Pemenuhan ABK

No	Jabatan	Jumlah Pegawai	
		BBPOM di Pontianak	Loka POM di Kab. Sambas
1	Kepala Balai Besar POM di Pontianak	1	0
2	Kepala Bagian Tata Usaha pada Balai Besar POM di Pontianak	1	0
3	Kepala Loka POM di Kab. Sambas	0	1
4	Analisis Anggaran Ahli Pertama	1	0
5	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1	0
6	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	1	0
7	Arsiparis Terampil	1	1
8	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	10	0
9	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	14	0
10	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	23	7
11	Pengawas Farmasi dan Makanan Mahir	3	0
12	Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia	4	0
13	Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil	1	0





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



No	Jabatan	Jumlah Pegawai	
		BBPOM di Pontianak	Loka POM di Kab. Sambas
14	Perencana Ahli Pertama	1	1
15	Pranata Keuangan APBN Mahir	1	0
16	Pranata Komputer Ahli Pertama	1	0
17	Pranata Komputer Terampil	1	0
18	Pranata SDM Aparatur Mahir	1	0
19	Asisten Kelola Obat dan Makanan	1	0
20	Pelaksana	1	0
21	Penata Kelola Obat dan Makanan	2	8
22	Penata Layanan Operasional	4	1
23	Pengadministrasi Perkantoran	2	0
24	Pranata Keuangan APBN Terampil	0	1
TOTAL		76	20

Berdasarkan tingkat pendidikan terdapat pegawai dengan tingkat pendidikan Strata dua (S2) sebanyak 12 orang, Profesi Apoteker sebanyak 14 orang, Strata satu (S1)/ sederajat 40 orang, Diploma tiga (D3) sebanyak 7 orang dan SMA/ sederajat sebanyak 3 orang. Balai Besar POM di Pontianak berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi pegawainya dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti Pendidikan lanjutan dengan tugas belajar maupun izin belajar.

Tabel 1.2. 3 Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak

Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
S2	12





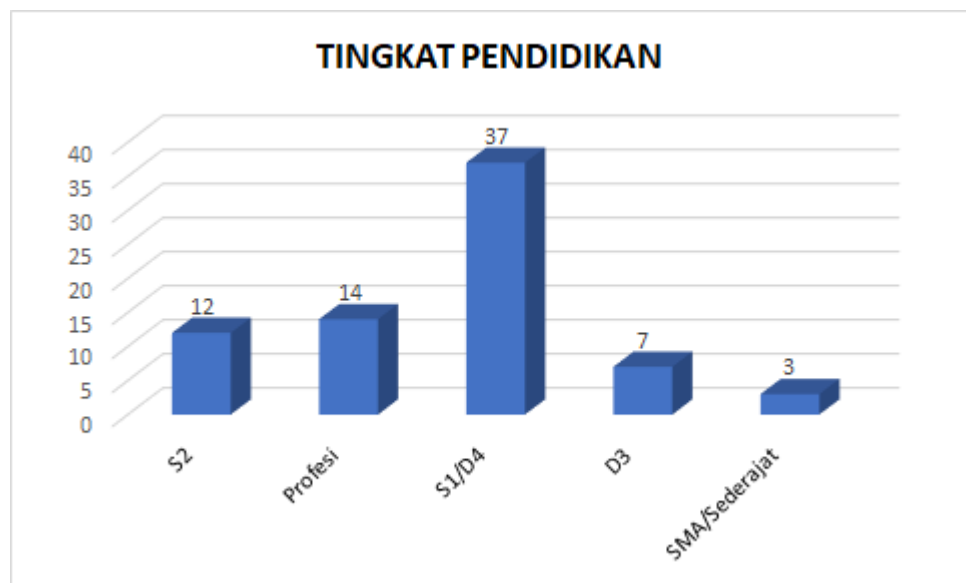
LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



Profesi	14
S1/D4	40
D3	7
SMA/Sederajat	3
Total	76



Grafik 1.2. 1. Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak

Tabel 1.2.4 Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak
Berdasarkan Gender

No.	Gender	BBPOM di Pontianak
1	Laki-laki	22
2	Perempuan	54

1.3. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Pontianak

Struktur Organisasi di Balai Besar POM di Pontianak sesuai Peraturan Badan POM RI Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



Makanan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki susunan organisasi yang terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

1) Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu. Bagian ini terdiri dari kepala bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
- e. pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian;
- f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

2) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





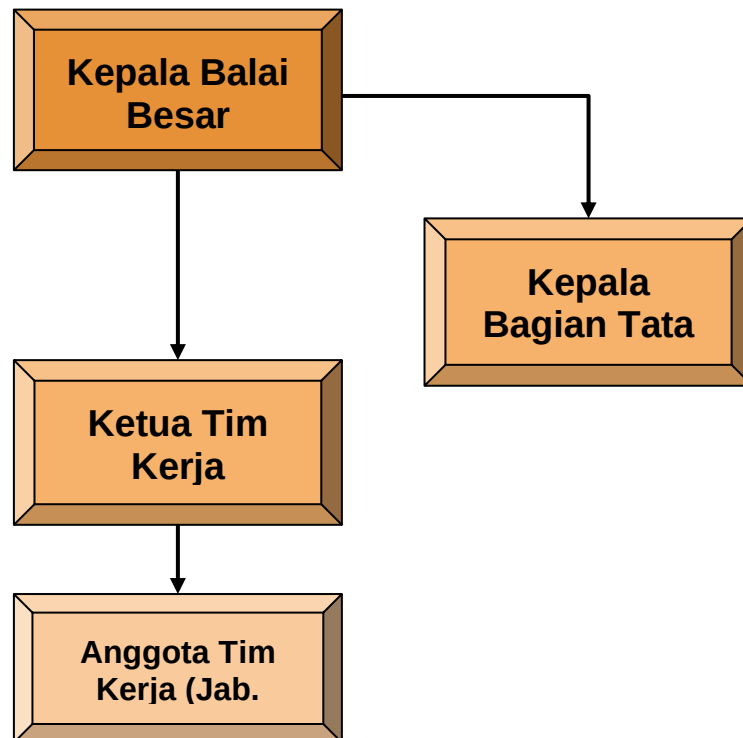
LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, kelompok jabatan fungsional bekerja dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi, yang terdiri dari ketua tim kerja dan anggota tim. Struktur organisasi Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:



Gambar 1.3.1. Struktur Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak

1.4. ISU STRATEGIS

Balai Besar POM di Pontianak mendukung kinerja Badan POM dan pembangunan di wilayah Kalimantan Barat, serta mendukung tugas dan fungsi instansi terkait dalam rangka perlindungan masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Balai Besar POM di Pontianak melaksanakan pengawasan mulai dari *pre-market* hingga *post-market* yang disertai dengan upaya pemberdayaan masyarakat dan penegakan hukum. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai Besar POM di





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



Pontianak perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Isu Internal

- Adanya perubahan Pedoman Sampling tahun 2025 berupa penambahan parameter uji baru yaitu Penetapan Kadar Cemar Akrilamida pada Kosmetik sediaan Perawatan Kulit dan adanya peningkatan volume pengujian Cemar Logam Berat secara AAS (*Atomic Absorption Spectroscopy*) pada sampel Obat Bahan Alam bentuk sediaan padat.
- Digitalisasi administrasi pemerintahan memerlukan alat pengolahan data yang mutakhir serta teknologi informasi yang optimal.
- Peningkatan kompetensi SDM untuk mendukung pencapaian kinerja yang optimal.
- Pencapaian maturitas manajemen risiko (SPIP terintegrasi) dan standar pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkelas dunia.
- Implementasi kebijakan anti penyuapan yang akan membantu organisasi untuk identifikasi dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundangan terkait melalui penerapan ISO 37001:2016 (*Anti Bribery Management System*).
- Peningkatan pemanfaatan Mobil Fungsional dalam mendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan.
- Mempersiapkan implementasi pola kerja *Flexible Working Arrangement (FWA)*.
- Peningkatan pemanfaatan ruang kerja bersama (*co-working space*).
- Kebutuhan layanan pengujian laboratorium terhadap sampel deteksi dini dan barang bukti dalam rangka penegakan hukum.





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



- Adanya Integrasi sistem manajemen mutu di lingkungan Badan POM yang memerlukan penyesuaian sistem manajemen di Balai Besar POM di Pontianak.
- Pemenuhan fasilitas dan peningkatan kompetensi petugas dalam penyelenggaraan pelayanan publik ramah kelompok rentan.

2. Isu Eksternal

- Arah kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang menyesuaikan dengan RPJMN 2025-2029.
- Perubahan modus kejahatan Obat dan Makanan memerlukan pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
- Belum optimalnya integrasi data antar lembaga penegak hukum (*Criminal Justice System*) dalam penanganan perkara kejahatan Obat dan Makanan.
- Maraknya peredaran Obat dan makanan secara online menuntut adanya pengembangan metode pengawasan, pembinaan, dan KIE berbasis teknologi informasi.
- Adanya kesepakatan bersama antara Indonesia dan Malaysia dalam pengawasan Obat dan makanan antara dua negara secara langsung berupa pertemuan rutin antara *Indonesian Food and Drug Authority Regional Office in Pontianak* dan *Ministry of Health in Sarawak*.
- Implementasi Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 17 Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sehingga memerlukan peningkatan literasi digital bagi pelaku usaha dan petugas terkait proses perizinan berusaha berbasis risiko dan pengembangan usaha.
- Adanya ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terkait distribusi obat di fasilitas lain selain fasilitas





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



pelayanan kefarmasian sehingga memerlukan ketentuan lebih lanjut agar dapat diimplementasikan oleh pelaku usaha dan pengembangan pedoman pelaksanaan pengawasan distribusi obat.

- Angka stunting di Provinsi Kalimantan Barat belum mencapai target nasional sehingga diperlukan sinergitas multisektor dalam percepatan penurunan prevalensi stunting.
- Implementasi strategi reformasi birokrasi nasional yaitu mendorong percepatan digitalisasi birokrasi serta melaksanakan RB tematik untuk mendorong percepatan penyelesaian isu nasional, khususnya terkait dengan pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi dan administrasi pemerintah.
- Kecepatan forensik digital dalam pengungkapan tindak pidana Obat dan Makanan dengan modus online.
- Maraknya peredaran parfum isi ulang yang mengandung metanol melebihi batas yang dipersyaratkan.
- Maraknya klinik kecantikan yang menggunakan obat dan skincare yang tidak memenuhi ketentuan.
- Meningkatnya perubahan iklim dunia memerlukan adanya aksi nyata dalam menumbuhkan kesadaran global terhadap keberlanjutan lingkungan dengan penerapan prinsip *go green* dalam kegiatan pengawasan Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah, ibu hamil dan balita memerlukan pengawasan keamanan pangan siap saji.
- Kebutuhan pendampingan intensif yang terus meningkat terhadap 18 UMKM dalam pemenuhan standar mutu, keamanan serta akses pemasaran produk untuk meningkatkan lapangan kerja, mendorong kewirausahaan dan berdaya saing.
- Kenaikan tarif pengujian sampel pihak ketiga berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 73 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- Optimalisasi realisasi anggaran DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (BOK POM) belum digunakan secara maksimal oleh Dinas Kesehatan.
- Masih rendahnya pelaporan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD)/Efek Samping Obat (ESO) oleh sarana pelayanan kefarmasian.
- Kualitas penggalangan *stakeholder* dalam rangka pencegahan kejahatan Obat dan Makanan.

3. Peluang

- Sehubungan dengan Integrasi Sistem Manajemen di lingkungan Badan POM, perlu dilakukan kaji ulang dokumen mutu terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang terintegrasi.
- Balai Besar POM di Pontianak sebaiknya melakukan sosialisasi secara terjadwal mengenai kebijakan anti penyuapan kepada seluruh pihak terkait baik secara internal kepada seluruh pegawai maupun secara eksternal kepada mitra dan *stakeholder* dengan memanfaatkan seluruh media yang ada.
- Program peningkatan Poles kosmetik yang telah berhasil diterapkan di laboratorium kosmetik juga telah diterapkan pada laboratorium yang lain mulai tahun 2024. Laboratorium Obat-NAPPZA, OBASKK dan Mikrobiologi telah menerapkan pembuatan laporan uji (Lampiran Catatan Pengujian) secara *paperless* (tidak dicetak). Hal ini dilakukan dalam upaya digitalisasi laboratorium dan menerapkan *Green Laboratory* dengan mengurangi penggunaan kertas. 19 Digitalisasi Laboratorium dan *Green Laboratory* merupakan *Grand Design* Laboratorium yang sedang digalakkan di lingkungan Badan POM saat ini. Diperlukan penambahan komputer untuk mendukung hal ini seperti yang telah diuraikan dalam poin Kecukupan Sumber Daya.





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



- Peningkatan sarana dan prasarana di laboratorium (aliran udara pada ruang Laboratorium Preparasi Obat) sehingga penerapan K3 dapat lebih efektif.
- Pemetaan jaringan dan penyesuaian bandwidth untuk PC yang terkoneksi pada alat laboratorium (*HPLC*, *GC*) untuk meluncurkan konektivitas pengendalian secara remote dari komputer lain.
- Pemanfaatan Mobil Penyidikan untuk kegiatan pengawasan Obat dan Makanan.
- Penetapan SOP Mikro pengadaan barang/jasa yang disertai timeline pada tiap tahapan pengadaan sehingga progress pengadaan dapat dipantau dan barang/jasa dapat diadakan sesuai timeline yang telah disepakati.
- Revisi SOP Mikro Layanan Pengujian laboratorium untuk mengakomodir *timeline* sampel barang bukti internal.





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Sebagaimana amanah Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Balai Besar POM di Pontianak menyusun Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar POM di Pontianak 2025-2029 sebagai tindak lanjut dari peraturan perundang undangan tersebut. Dalam RPJPN 2025-2045, BPOM khususnya mendukung Kebijakan Transformasi Sosial Kesehatan Untuk Semua, yaitu pembangunan kesehatan yang bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun Perempuan. Dalam kebijakan tersebut, penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk termasuk pengawasan siber dan farmakovigilans menjadi salah satu strategi yang difokuskan dalam mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif.

Sejalan dengan arah Pembangunan RPJPN 2025-2045, BPOM telah menetapkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 434 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Jangka Panjang Pengawasan Obat dan Makanan Dalam Rangka Mendukung Transformasi Nasional Menuju Indonesia Emas 2045. PJP POM disusun dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis nasional dan global serta megatrend yang akan berdampak pada pengawasan Obat dan Makanan, dalam konteks transformasi nasional. PJP POM menjabarkan aspek-aspek yang relevan dalam rangka memastikan





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



keamanan, efektivitas, dan kualitas Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia dan menyesuaikan kerangka kerja regulasi yang inovatif dan inklusif untuk menanggapi perubahan pasar dan kebutuhan masyarakat yang dinamis.

2.2. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai Besar POM di Pontianak sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi Badan POM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan Balai Besar POM di Pontianak dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

A. Visi

Sebagai lembaga vertikal Balai Besar POM di Pontianak memiliki visi serupa dengan BPOM yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu:

“Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

- 1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:** Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
- 2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:** BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.

3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.

4. Masyarakat Sehat dan Sejahtera: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan.

B. Misi

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:

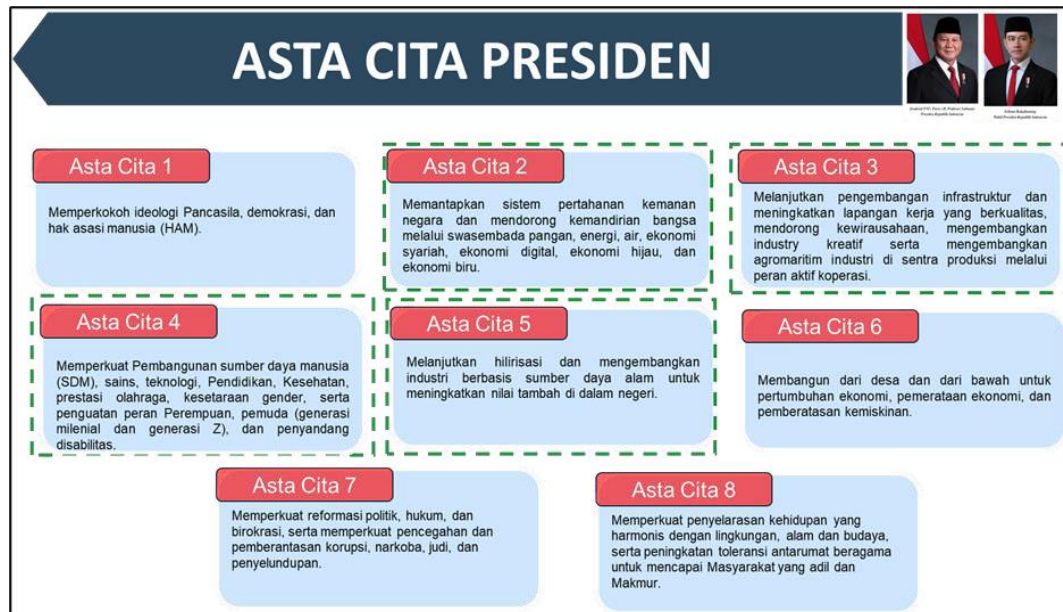




LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



Gambar 2.2.1. Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu Asta Cita 2, 3 dan 5 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.





4. **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip good governance dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

C. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. **Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



2. **Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan.
3. **Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM:** Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan. BPOM berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. **Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5. **Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima:** Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas obat dan makanan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Balai Besar POM di Pontianak, digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Pontianak periode 2025-2029 serta telah tertuang pada dokumen Rencana Strategis Balai Besar POM di Pontianak. Namun seiring dengan perkembangan teknologi dan isu-isu strategis yang beredar di masyarakat, maka Balai Besar POM di Pontianak melakukan *update* matriks SWOT untuk menyesuaikan strategi yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Balai Besar POM di Pontianak di pada periode selanjutnya.

Berikut matriks SWOT terbaru Balai Besar POM di Pontianak:





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



Tabel 2.2. 1 SWOT BBPOM di Pontianak

Kekuatan (<i>Strength</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
1. Wilayah Bebas Korupsi Melalui Zona Integritas yang terjaga 2. Kolaborasi lintas sektor dan jaringan kerja sama yang aktif 3. Kompetensi dan profesionalitas SDM Pengawas Obat dan Makanan 4. Digitalisasi dan inovasi dalam penerapan SPBE Balai Besar POM di Pontianak 5. Laboratorium Pengujian yang terakreditasi 6. Ekosistem edukasi, pemberdayaan masyarakat serta pelaku usaha yang kuat 7. Infrastruktur pelayanan publik yang memadai	1. Keterbatasan Jumlah SDM Pengawas Obat dan Makanan 2. Dukungan sarana dan prasarana perkantoran yang belum optimal 3. Penggunaan Teknologi Informasi (TI) belum optimal 4. Motivasi Peningkatan Kompetensi Jalur Pendidikan Lanjutan Masih Rendah 5. Penerapan prinsip green Laboratory yang masih rendah
Peluang (<i>Opportunities</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



1. Pertumbuhan Pasar dan Peningkatan Produksi Pangan Olahan Yang Berkelanjutan 2. Kolaborasi strategis BPOM dengan stakeholder baru 3. Dukungan Kebijakan Nasional melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2017 sebagai Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan secara Lintas Sektor 4. Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1. Letak geografis Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia 2. Luas wilayah cakupan pengawasan di wilayah provinsi Kalimantan Barat 3. <i>E-commerce</i> dan kejahatan siber di bidang obat dan makanan 4. Penyebaran berita <i>hoax</i> yang massif terkait sediaan farmasi dan pangan olahan 5. Demografi Penduduk Provinsi Kalimantan Barat
--	---

Berdasarkan SWOT yang terbaru diatas, maka strategi yang akan dilakukan Balai Besar POM di Pontianak sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan famasi dan pangan olahan yang berbasis resiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan penagwasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin di wilayah Provinsi Kalimantan Barat;





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



2. Penguatan fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor, baik dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Kalimantan Barat dan tentunya Kepolisian Daerah.
3. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi seperti penciptaan produk berkualitas dan berdaya saing yang ramah lingkungan;
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi yang efektif untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Mendorong penciptaan kolaborasi kemitraan yang lebih luas, kuat dan aktif di wilayah Kalimantan Barat;
6. Penguatan pengelolaan SDM, peningkatan sarana dan prasarana perkantoran yang lebih serta memanfaatkan TIK yang lebih modern;
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Pontianak, termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

2.3. BUDAYA ORGANISASI

BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Core Values ASN ini adalah inti dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Core values ini menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja, yang tidak hanya dilakukan pada ASN tingkat pusat namun juga pada tingkat daerah.





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



BerAKHLAK merupakan panduan perilaku bagi ASN. Nilai dasar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dan menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Adapun detil dari nilai-nilai tersebut adalah:

1. **Berorientasi Pelayanan**, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
2. **Akuntabel**, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
3. **Kompeten**, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
4. **Harmonis**, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
5. **Loyal**, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara;
6. **Adaptif**, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan;
7. **Kolaboratif**, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.

2.4. SASARAN KEGIATAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2025-2029, Balai Besar POM di Pontianak menetapkan sasaran kegiatan, indikator kegiatan dan target dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di Pontianak. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) diharapkan Balai Besar POM di Pontianak akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagaimana tergambar pada matriks berikut:

Tabel 2.4.1. Matriks Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025-2029





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



No	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
1. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT						
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,75	88,50	90,25	92	93,75
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	27	28	29	30
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	91	93
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	92	95
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	96,4	96,5	96,6	96,7	96,8
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86	88	89	91	92





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



No	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	88	90	92	95
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,13	95,25	96,38	97,5	98,63
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	92	95
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83,3	85,5	87,7	90,1	92,5
2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi						
12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60	80	80	80	100
3. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT						
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan	73,4	77,5	81	84	86,3





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



No	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
	Laboratorium					
4. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT						
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,4	87,26	88,13	88,99	89,86
15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	13	15	18	20	22
16	Jumlah desa pangan aman	4	7	7	7	7
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	1	2	2
5. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu						
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan	87,3	88,3	89,3	90,3	91,3
6. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT						
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91	92	93	94	95
7. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah						





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



No	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
kerja UPT						
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	91	92	93	94
8. Layanan Publik UPT yang prima						
21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7	4,75	4,8	4,85	4,9
9. Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal						
22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90	90,5	91	91,5	92
23	Nilai AKIP UPT BPOM	81,15	81,65	82,15	82,65	83,15
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	5	5	5
25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3	3,2	3,4	3,6	3,8

Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, Balai Besar POM di Pontianak sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2025-2029. Penyusunan Renstra Balai Besar POM di Pontianak ini berpedoman pada RPJMN periode 2025-2029 dan perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan. Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut :





1. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan,
- 2) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO,
- 3) Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan,
- 4) Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar,
- 5) Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan,
- 6) Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
- 7) Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- 8) Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- 9) Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- 10) Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- 11) Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



- 1) Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

3. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium.

4. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT,
- 2) Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan,
- 3) Jumlah desa pangan aman,
- 4) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.

5. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan.

6. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

7. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

8. Layanan Publik UPT yang prima

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Indeks Pelayanan Publik UPT.

9. Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM.
- 2) Nilai AKIP UPT BPOM.
- 3) Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
- 4) Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

2.5. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025 adalah bentuk penjabaran langkah-langkah pencapaian kinerja yang akan dilakukan pada tahun 2025 dan juga sebagai acuan dalam penyusunan





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan. RKT Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor PR.06.01.15A.09.24.262 Tahun 2024 tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.5.1 berikut:

Tabel 2.5.1. Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK			
TAHUN 2025			
NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
	distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai Besar POM di Pontianak sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73,4
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak	95,5
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	2
		Jumlah desa pangan aman	4
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPOB Pangan Olahan	85

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai Besar POM di Pontianak	94
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh Balai Besar POM di Pontianak	14
10	Layanan Publik Balai Besar POM di Pontianak yang prima	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Pontianak	4,7
11	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Pontianak	87,90
		Nilai AKIP UPT BPOM	80,02
		Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak	90,23
		Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Pontianak	3,7

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK

(FAUZI FERDIANSYAH)





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



2.6. PERJANJIAN KINERJA

Setelah penyerahan DIPA Balai Besar POM di Pontianak Tahun Anggaran 2025, maka disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA yang telah disahkan sebesar Rp 30.625.979.000.

Tabel 2.6.1. Perjanjian Kinerja Tahunan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Tahun 2025


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI PONTIANAK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAUZI FERDIANSYAH
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Pontianak

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, 12 Februari 2025

Pihak Pertama Kepala Balai Besar POM di Pontianak  FAUZI FERDIANSYAH	Pihak Kedua Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI  TARUNA IKRAR
---	---





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,75 %
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 %
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 %
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 %
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 %
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	96,4 %
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86 %
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 %
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,13 %
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 %

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
2.	02 - Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	11 - Persentase lisan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83,3 %
		01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60 %
		03 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73,4 %
		04 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,4 Nilai
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	13 Sekolah
		03 - Jumlah desa pangan aman	4 Desa
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar
		05 - Persentase UMKM yang didampingi dari memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	87,3 %
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91 %
		02 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 %
5.	05 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7 Nilai





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan Zi UPT BPOM	90 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	8115 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3 Nilai
Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 30.625,979,000 (Tiga Puluh Miliar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah)			
NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	19,426,816,000	
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	11,199,163,000	
Pontianak, 12 Februari 2025			
Pihak Pertama Kepala Balai Besar POM di Pontianak		Pihak Kedua Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI	
			
FAUZI FERDIANSYAH		TARUNA IKRAR	

2.7. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2025 menyajikan target triwulan dan per bulan yang tercantum dalam PK Balai Besar POM di Pontianak beserta anggarannya sebagaimana tabel tabel 2.7.1 berikut:





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



Tabel 2.7.1. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Balai Besar POM di Pontianak

 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI BESAR POM DI PONTIANAK BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN																
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		86,75	86,75	86,75	86,75	86,75	86,75	86,75	86,75	86,75	86,75	86,75	728,580,000	
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO											26	43,550,000		
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	114,174,300	
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	114,174,300	
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	152,232,400	
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil	6	13	19	25	32	38	45	51	56	64	71	96,4	7,281,500	
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	7,281,500	
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	7,281,500	
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,13	94,13	94,13	94,13	94,13	94,13	94,13	94,13	94,13	94,13	94,13	94,13	291,020,000	
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	291,020,000	
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	7,281,500	
2.	02 - Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan					20	20	40	40	60	60	60	60	4,123,000	
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			72	72	72	72,5	72,5	72,5	73	73	73	73,4	11,070,379,000	
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			86,4	86,4	86,4	86,4	86,4	86,4	86,4	86,4	86,4	86,4	2,994,814,000	
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan			10	25	40	50	60	70	75	85	90	13	412,741,000	
		03 - Jumlah desa pangan aman			10	25	35	45	50	60	70	80	90	4	630,324,000	
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas			10	25	60	70	75	80	85	90	95	1	142,115,000	
		05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	5	10	40	55	60	65	70	75	85	90	95	87,3	65,789,000	
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT			7,5	7,5	27,5	27,5	42,5	42,5	50	85	85	91	610,915,000	
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	150,564,000	
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4,7	116,175,000	
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												90	374,250,000	
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												81,15	366,250,000	
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	11,557,413,000	
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3	366,250,000	
Total															30,625,979,000	





2.8. KATEGORI PENCAPAIAN INDIKATOR

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan disebutkan bahwa setiap unit pelaksana teknis melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja untuk mencapai sasaran strategis. Untuk dapat mengukur kinerja baik kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran menggunakan alat ukur berupa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ini harus memenuhi unsur SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Reasonable dan Timetable*).

Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja menggunakan dua macam tergantung angka realisasi dengan angka target yang menunjukkan capaian semakin membaik atau sebaliknya.

Apabila semakin **tinggi** angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin **baik**, maka digunakan rumus sbb :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



Tabel 2.8.1. Kategori Pencapaian Indikator

Notifikasi Warna	Capaian	Kategori
	· Capaian Indikator $>110\%$	Tidak dapat disimpulkan
	· Capaian Indikator $100\% < x \leq 110\%$	Sangat Baik
	Capaian Indikator $90\% < x \leq 100\%$	Baik
	· Capaian Indikator $60\% \leq x \leq 90\%$	Cukup
	· Capaian Indikator $x < 60\%$	Kurang

- **Nilai Kinerja Organisasi (NKO)**

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor: PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025, tingkat keberhasilan capaian kinerja sebuah unit kerja dihitung dengan Nilai Kinerja Organisasi. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di lingkungan BPOM terdiri dari:

- **NKO Periodik**

NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai.

- NKO tahunan

NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 komponen yaitu:

(1) Capaian Perjanjian Kinerja

Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.

(2) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian PAN RB setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah. Sementara hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja dalam Kementerian/Lembaga (satuan kerja) diterbitkan oleh inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah.

Hasil NKO dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut.





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

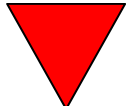
TRIWULAN II 2025



Tabel 2.8.2. Kategori Pencapaian NKO

Notifikasi Warna	Capaian	Kategori
	>100	Istimewa
	$80 < \text{NKO} \leq 100$	Baik
	$60 < \text{NKO} < 80$	Butuh Perbaikan
	$20 < \text{NKO} < 60$	Kurang
	$0 \leq \text{NKO} < 20$	Sangat Kurang

Pada laporan kinerja interim juga terdapat pembahasan mengenai perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya. Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100\%$.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $70\% - <100\%$ ($70 \leq x < 100$).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $<70\%$ ($x < 70$).	





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran indikator kinerja dari masing-masing Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator kinerja triwulan II tahun 2025 dihitung dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 terhadap target triwulan yang telah ditetapkan pada RAPK tahun 2025. Selanjutnya perhitungan/pengukuran kinerja dilakukan analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja, yaitu (1) membandingkan antara realisasi kinerja dengan target triwulan bersangkutan; (2) membandingkan realisasi kinerja dengan triwulan sebelumnya; (3) membandingkan realisasi kinerja dengan tahun bersangkutan; (4) analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; dan (5) analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



Tabel 3.1.1. Kategori Capaian Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Triwulan II Tahun 2025

Matriks Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja / Nilai Kinerja Organisasi							
BALAI BESAR POM DI PONTIANAK							
JUNI (TRIWULAN 2) TAHUN 2025							
Indikator	Target 2025 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan%	Realisasi s.d bulan			Kriteria	
			JUNI				
			Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Normalisasi Capaian PK		
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT							
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,75	86,75	99,07	114,20	110	SANGAT BAIK
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESQ	26	-	-	-	-	Penilaian Akhir Tahun
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	98,54	115,93	110	SANGAT BAIK
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	-	-	-	Tidak Ada Sampel
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	90,69	106,69	106,69	SANGAT BAIK
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	96,4	38	40,45	106,46	106,46	SANGAT BAIK
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86	86	100	116,27	110	SANGAT BAIK
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	93,33	109,80	109,80	SANGAT BAIK
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,13	94,13	100	106,24	106,24	SANGAT BAIK
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	98,25	115,59	110	SANGAT BAIK

Matriks Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja / Nilai Kinerja Organisasi							
BALAI BESAR POM DI PONTIANAK							
JUNI (TRIWULAN 2) TAHUN 2025							
Indikator	Target 2025 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan%	Realisasi s.d bulan			Kriteria	
			JUNI				
			Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Normalisasi Capaian PK		
11	Persentase Iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83,3	83,3	98,56	118,31	110	SANGAT BAIK
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi							
12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60	20	20	100	100	BAIK
Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT							
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73,4	72,10	72,4	100,42	100,42	SANGAT BAIK
Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT							
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,4	86,40	88,52	102,45	102,45	SANGAT BAIK
15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	13	80	80	100	100	BAIK
16	Jumlah desa pangan aman	4	70	70	100	100	BAIK
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	70	70	100	100	BAIK
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu							
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPOB pangan olahan	87,3	75	75,83	101,11	101,11	SANGAT BAIK

Matriks Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja / Nilai Kinerja Organisasi							
BALAI BESAR POM DI PONTIANAK							
JUNI (TRIWULAN 2) TAHUN 2025							
Indikator	Target 2025 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan%	Realisasi s.d bulan			Kriteria	
			JUNI				
			Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Normalisasi Capaian PK		
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT							
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91	23	26	113,04	110	SANGAT BAIK
Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT							
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	50	100	100	BAIK
Layanan Publik UPT yang prima							
21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7	-	-	-	-	Penilaian Akhir Tahun
Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal							
22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90	-	-	-	-	Penilaian Akhir Tahun
23	Nilai AKIP UPT BPOM	81,15	-	-	-	-	Penilaian Akhir Tahun
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	-	-	-	-	Penilaian Akhir Tahun
25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3	-	-	-	-	Penilaian Akhir Tahun
TOTAL CAPAIAN				1893,17/18			
NILAI KINERJA ORGANISASI				105,18			
PREDIKAT NKO				ISTIMEWA			





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Balai Besar POM di Pontianak. Capaian kinerja yang diraih merupakan gabungan capaian Balai Besar POM di Pontianak. Adapun penjelasan masing-masing sasaran kegiatan adalah sebagai berikut :

**SASARAN KEGIATAN 1**
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT

Dalam upaya mewujudkan perlindungan kesehatan masyarakat yang optimal, peningkatan efektivitas pengawasan terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan diarahkan untuk memastikan bahwa setiap produk farmasi dan pangan olahan yang beredar di masyarakat memenuhi standar mutu, keamanan dan manfaat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penguatan pengawasan dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko, pemanfaatan teknologi informasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, kerja sama lintas sektor juga diperkuat untuk menciptakan sistem pengawasan yang terintegrasi dan responsif terhadap dinamika perkembangan industri dan distribusi produk.

Dengan meningkatnya efektivitas pengawasan, diharapkan potensi peredaran produk ilegal, palsu atau yang tidak memenuhi standar dapat ditekan secara signifikan. Sehingga mendukung terciptanya jaminan perlindungan konsumen serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengawasan dan keamanan produk farmasi dan pangan olahan di Indonesia.

Untuk menilai keberhasilan sasaran strategis ini dilakukan pengukuran terhadap indikator kinerja sebagai berikut:





SK.1.IKSK.1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator ini mengukur proporsi sampel sediaan farmasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian dalam kegiatan pengawasan *post-market*. Definisi operasional terkait indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik.
2. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode *targeted* atau *purposive* sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.
3. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.
4. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.
5. Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta *timeline* yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Cara perhitungan indikator kinerja:

Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = $(A+B+C+D)/4$

A = persentase sampel obat yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = $a+b+c+d+e$





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



- a. kesesuaian perencanaan sampling (bobot 30%)
- b. kesesuaian pelaksanaan sampling (bobot 20%)
- c. kesesuaian pelaksanaan pengujian (bobot 20%)
- d. kesesuaian pelaporan hasil sampling dan pengujian (bobot 20%)
- e. kesesuaian pelaporan monitoring penarikan (bobot 10%)

B = persentase sampel obat bahan alam yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$

- a. pemenuhan target pengawasan
- b. kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian, dan pelaporan
- c. kesesuaian parameter uji
- d. akurasi dalam penentuan kesimpulan
- e. tanggapan atas surat tindak lanjut

C = persentase sampel suplemen kesehatan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$

- a. pemenuhan target pengawasan
- b. kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian, dan pelaporan
- c. kesesuaian parameter uji
- d. akurasi dalam penentuan kesimpulan
- e. tanggapan atas surat tindak lanjut

D = persentase sampel kosmetik yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$

- a. pemenuhan target pengawasan
- b. kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan
- c. kesesuaian parameter uji
- d. akurasi dalam penentuan kesimpulan
- e. tanggapan atas surat tindak lanjut





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2025

Tabel 3.1.2. Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	86,75	99,07	110	Sangat Baik

Realisasi indikator kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan II tahun 2025 sebesar 99,07%. Realisasi ini mencapai target triwulan II tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu 86,75%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 110% yang termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya.

Indikator Kinerja	Realisasi TW II 2025 (%)	Realisasi TW Sebelumnya (%)
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	99,07	100





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



Realisasi indikator kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan II tahun 2025 sebesar 99,07%. Meskipun mengalami penurunan sebesar 0,93% dibandingkan Triwulan I, capaian ini masih tergolong sangat baik dan mencerminkan kinerja yang positif.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi TW II 2025 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	86,75	99,07	110	 Tercapai/ Melampaui

Realisasi indikator kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan II tahun 2025 sebesar 99,07%. Realisasi ini mencapai target tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu 86,75%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 110% yang termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui**.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Realisasi persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan II tahun 2025 mencapai target yang ditetapkan dikarenakan:





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



- a. Penyesuaian jadwal sampel berdasarkan ketersediaan reagen dan suku cadang serta kesiapan peralatan laboratorium.
- b. Pelaksanaan sampling dan pengawasan penandaan sudah dilakukan sesuai pedoman.
- c. Sosialisasi SOP pelayanan pengujian yang direvisi berdasarkan pedoman sampling dan kebijakan regional terkini memastikan pengujian dilakukan secara sistematis dan sesuai standar waktu yang ditetapkan.
- d. Efektivitas pelaporan sampel melalui Sistem Informasi Pengujian Terpadu (SIPT) dimana setiap fungsi dalam alur kerja menjalankan perannya sesuai dengan *timeline* yang telah ditetapkan sehingga sampel dapat ditindaklanjuti lebih cepat.
- e. Adanya penambahan alat laboratorium sehingga mendukung percepatan penyelesaian pengujian sampel.
- f. Adanya monitoring dan evaluasi dari pengampu sehingga setiap tahapan sampling dan pengujian terkelola sesuai alur dan standar waktu yang ditetapkan serta kendala dapat ditangani secara efektif.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II Tahun 2025 di Balai Besar POM di Pontianak yaitu:

- a. Pelaksanaan sampling dan pengujian produk sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian.
- b. Penguatan sistem pelaporan hasil uji melalui SIPT.
- c. Peningkatan kompetensi petugas pengawas dan penguji secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.





- d. Pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.
- e. Pengadaan alat laboratorium yang dilakukan secara tepat waktu sehingga memperkuat kapasitas dan kelancaran proses pengujian di laboratorium.
- f. Penerapan ISO 17025:2017 yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 secara konsisten.

SK.1.IKSK.2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD atau ESO

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan)

Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans)

Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans)

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.

KIE Farmakovigilans adalah kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilans yang dilaksanakan oleh UPT BPOM kepada Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya.

Fasilitas pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan. Satu tenaga kesehatan mewakili satu fasilitas pelayanan kesehatan. Setiap tenaga kesehatan diberikan Sertifikat sebagai bukti mengikuti KIE Farmakovigilans.

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM = $(A / B) \times 100\%$

Keterangan: A merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan. B merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM.

SK.1.IKSK.3. Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:

1. kesesuaian target sampel UPT;
2. kesesuaian parameter uji;
3. ketepatan pengambilan kesimpulan;
4. ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
5. ketepatan pelaporan sampling dan pengujian

Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya antara lain:

1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kadaluwarsa
2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2025

Tabel 3.1.5. Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan oleh Balai Besar POM di Pontianak Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	85	98,54	110	Sangat Baik





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



Realisasi indikator kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada TW II tahun 2025 sebesar 98,54%. Realisasi ini telah mencapai target triwulan II tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 85%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 110% sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.1.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II 2025 (%)	Realisasi TW Sebelumnya (%)
Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	98,54	100

Realisasi indikator kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan II tahun 2025 sebesar 98,54%. Meskipun mengalami penurunan sebesar 1,46% dibandingkan Triwulan I, capaian ini masih tergolong sangat baik dan mencerminkan kinerja yang positif.





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.1.7. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi TW 2025(%) II	Capaian (%)	Kategori
Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	85	98,54	110	 Tercapai/ Melampaui

Realisasi indikator kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan II tahun 2025 sebesar 98,54%. Realisasi ini memang sudah mencapai target akhir tahun 2025 yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 85% yang termasuk dalam kategori **Tercapai**, namun perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan untuk menjaga konsistensi capaian serta mengidentifikasi potensi kendala atau hambatan yang mungkin terjadi pada triwulan berikutnya. Dengan demikian, keberhasilan pada triwulan II ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat dalam menjaga kualitas pelaksanaan program dan mencapai target kinerja secara berkelanjutan hingga akhir tahun 2025.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



Realisasi Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak pada triwulan II tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh:

- a. Tingginya komitmen dan kinerja petugas pengawasan di lapangan yang secara konsisten melakukan *sampling* dan pengujian sampel pangan olahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Koordinasi yang efektif antara Balai Besar POM di Pontianak dengan lintas sektor terkait, seperti pemerintah daerah, dinas kesehatan, serta pelaku usaha, sehingga proses tindak lanjut terhadap hasil pengawasan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran.
- c. Tersedianya sumber daya laboratorium yang memadai, baik dari segi peralatan maupun analis sehingga pengujian sampel dapat dilakukan secara efektif dan efisien
- d. Adanya monitoring dan evaluasi internal secara berkala untuk memastikan setiap tahapan proses pengawasan dan tindak lanjut berjalan sesuai ketentuan yang ditetapkan.

5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pemenuhan target kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada Triwulan II telah mencapai hasil target yang ditetapkan. Adapun upaya yang dilakukan antara lain:

- a. Melaksanakan *sampling* dan pengujian produk sesuai dengan Pedoman *Sampling* dan Pengujian.
- b. Meningkatkan pengawasan dengan memberikan pembinaan dan sanksi kepada sarana produksi dan distribusi yang Tidak Memenuhi Ketentuan.





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



- c. Meningkatkan kompetensi petugas pengawas dan penguji secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.
- d. Melakukan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.
- e. Menerapkan ISO 17025:2017 yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 secara konsisten.

SK.1.IKSK.4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar:

$$\frac{\text{Jumlah Sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar}}{\text{Total jumlah sampel KLB keracunan pangan dikirim atau diuji ke BPOM}} \times 100\%$$

SK.1.IKSK.5. Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan.

- a. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling.
- b. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya
- c. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan).
- d. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.1.8. Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	90,69	106,69	Sangat Baik

Realisasi indikator kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada TW II tahun 2025 sebesar 90,69%. Realisasi ini telah mencapai target triwulan II tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 85%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 106,69% sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.1.9. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II 2025 (%)	Realisasi TW Sebelumnya (%)
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,69	92,07





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



Realisasi indikator kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2025 sebesar 90,69%. Pada triwulan sebelumnya realisasi indikator kinerja ini sebesar 92,07%, terjadi penurunan realisasi sebesar 1,38% namun masih di atas target yang ditetapkan.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.1.10. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi TW II 2025 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	90,69	106,69	 Tercapai/ Melampaui

Realisasi indikator kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2025 sebesar 90,69%. Realisasi ini termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui**.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak pada triwulan II tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh:





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



1. Tingginya komitmen dan kinerja petugas pengawasan di lapangan yang secara konsisten melakukan *sampling* dan pengujian sampel PIRT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Koordinasi yang efektif antara Balai Besar POM di Pontianak dengan lintas sektor terkait, seperti pemerintah daerah, dinas kesehatan, serta pelaku usaha, sehingga proses tindak lanjut terhadap hasil pengawasan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran.
3. Tersedianya sumber daya laboratorium yang memadai, baik dari segi peralatan maupun analis sehingga pengujian sampel dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
4. Adanya monitoring dan evaluasi internal secara berkala untuk memastikan setiap tahapan proses pengawasan dan tindak lanjut berjalan sesuai ketentuan yang ditetapkan.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pemenuhan target kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan II telah mencapai hasil target yang ditetapkan. Adapun upaya yang dilakukan antara lain:

1. Melaksanakan *sampling* dan pengujian produk sesuai dengan Pedoman *Sampling* dan Pengujian.
2. Melaksanakan pengujian sampel PIRT dengan parameter uji yang sesuai pedoman *sampling* pengujian terbaru.
3. Pelaksanaan pelaporan *sampling* dan pengujian berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 193 Tahun 2023 tentang Regionalisasi Laboratorium BPOM antara lain memuat mengenai ketentuan pelaporan hasil uji selama 15 s/d 20 Hari Kerja.
4. Menindaklanjuti hasil pengujian sampel yang TMS sesuai ketentuan.
5. Melakukan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



6. Menerapkan ISO 17025:2017 yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 secara konsisten.

SK.1.IKSK.6. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh Balai Besar POM di Pontianak kepada *stakeholder* yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, sarana distribusi, dan sarana pelayanan kefarmasian yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Stakeholder/pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha sebagai objek pengawasan dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari *stakeholder* terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Adapun dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2025

Tabel 3.1.11. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* Triwulan II Tahun 2025





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh <i>Stakeholder</i>	38	40,45	106,46	Sangat Baik

Realisasi indikator kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* pada triwulan II tahun 2025 sebesar 40,45%. Realisasi ini telah mencapai target triwulan II tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 38%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 106,46 % sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.1.12. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II 2025 (%)	Realisasi TW Sebelumnya (%)
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh <i>Stakeholder</i>	40,45	35

Realisasi indikator kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* pada triwulan II tahun 2025 sebesar 40,45%.





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



Dibandingkan dengan realisasi Triwulan I tahun 2025, terdapat peningkatan realisasi kinerja sebesar 5,45 %.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.1.13. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi TW II 2025 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh <i>Stakeholder</i>	96,4	40,5	41,96	 Perlu Upaya Keras

Realisasi indikator kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* pada triwulan II tahun 2025 sebesar 40,45%. Realisasi ini belum mencapai target akhir tahun 2025 yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 96,4% sehingga termasuk dalam kategori **Perlu Upaya Keras**

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tercapainya target indikator kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* triwulan II 2025 disebabkan antara lain:





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



- a. Adanya relaksasi anggaran pengawasan pada triwulan II tahun 2025 sehingga jumlah keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan meningkat dari TW I.
- b. Adanya kemudahan pelaporan tindakan perbaikan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan dalam rangka pencapaian target indikator kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* antara lain:

- a. Memberikan batas waktu penyampaian respon tindak lanjut dalam surat tindak lanjut hasil inspeksi.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut hasil inspeksi.
- c. Melakukan monitoring laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil inspeksi dari lintas sektor dan pelaku usaha.

SK.1.IKSK.7. Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sarana produksi sediaan farmasi yaitu meliputi:

- 1) Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
- 2) Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, industri





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), dan industri suplemen kesehatan.

- 3) Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Sarana produksi sediaan farmasi yang berada di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak yaitu Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), serta industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Sarana produksi sediaan farmasi tersebut diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahapan, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Sarana produksi sediaan farmasi tersebut diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Cara Perhitungan Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah rata-rata dari % Sarana Produksi Obat, % Sarana Produksi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarana Produksi Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

% Sarana Produksi OBA dan SK = Rata-rata (A+B+C+D)

- A. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%
- B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



- C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = $(\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar} / \text{jumlah sarana yang selesai diperiksa}) \times 100\%$
- D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = $(\text{Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu} / \text{jumlah seluruh tindak lanjut}) \times 100\%$

*Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen A dan B.

% Sarana Produksi Kosmetik = Rata-rata (A+B+C+D)

- A. Pelaksanaan inspeksi = $(\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana} / \text{jumlah target sesuai renlak}) \times 100\%$
- B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = $(\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}) \times 100\%$
- C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = $(\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai} / \text{jumlah sarana yang selesai diperiksa}) \times 100\%$
- D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = $(\text{Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu} / \text{jumlah seluruh tindak lanjut}) \times 100\%$





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2025

Tabel 3.1.14. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	86	100	110	Sangat Baik

Realisasi indikator kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan II tahun 2025 sebesar 100%. Realisasi ini telah mencapai target triwulan II tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 86%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 110% sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.1.15. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II 2025 (%)	Realisasi TW Sebelumnya (%)
Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	100	0

Realisasi indikator kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan II tahun 2025 sebesar 100%. Capaian realisasi indikator pada TW ini





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



meningkat dibandingkan dengan capaian realisasi TW I yaitu sebesar 0%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.1.16. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi TW II 2025 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	86	100	110	 Tercapai/Melampaui

Realisasi indikator kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan II tahun 2025 sebesar 100%. Realisasi ini mencapai target tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu 86%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 110% yang termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui**.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Pencapaian target indikator kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II Tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- Penyesuaian rencana pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi setelah adanya relaksasi anggaran.
- Komitmen Balai Besar POM di Pontianak dalam menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan.





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



- c. Petugas yang kompeten dalam melakukan tindak lanjut hasil inspeksi sarana produksi sesuai dengan pedoman tindak lanjut.
- d. Tersedianya sumber daya anggaran yang dikelola secara akuntabel.

5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II Tahun 2025 di Balai Besar POM di Pontianak yaitu:

- a. Melakukan koordinasi dengan kedeputian terkait penetapan kajian risiko pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi.
- b. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan.
- c. Meningkatkan kompetensi petugas dalam melakukan inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, termasuk pelaksanaan tindak lanjut hasil inspeksi.

Tabel 3.1.17 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

No .	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
			Selesai	Belum			
				Rencana Aksi	Timelin e		
1	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Melakukan percepatan pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi	Melakukan percepatan pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi pada TW II 2025	-	-	Belum adanya sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa	Sarana produksi sediaan farmasi sudah diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai target.





SK.1.IKSK.8. Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dianggap berisiko berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku, termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.

Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

1. Ketepatan waktu pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT,
2. Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan, dan
3. Kesesuaian *grading* indeks kepatuhan pelaku usaha.





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2025

Tabel 3.1.18. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk RTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	93,33	109,80	Sangat Baik

Realisasi indikator kinerja Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2025 sebesar 93,33%. Realisasi ini telah mencapai target triwulan II tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 85%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 109,80% sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.1.19. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II 2025 (%)	Realisasi TW Sebelumnya (%)
Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,33	-

Realisasi indikator kinerja persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



pada triwulan II tahun 2025 sebesar 93,33%. Realisasi ini tidak dapat dibandingkan dengan realisasi sebelumnya karena pada triwulan I 2025 belum dilakukan perhitungan untuk indikator ini.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.1.20. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi TW II 2025 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	93,33	109,80	 Tercapai/Melampaui

Realisasi indikator kinerja Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2025 sebesar 93,33%. Realisasi ini mencapai target tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu 85%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 109,80% yang termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui**.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Pencapaian target indikator kinerja Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



- a. Komitmen Balai Besar POM di Pontianak dalam menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan.
- b. Petugas yang kompeten dalam melakukan tindak lanjut hasil inspeksi sarana produksi sesuai dengan pedoman tindak lanjut.
- c. Tersedianya sumber daya anggaran yang dikelola secara akuntabel.

5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2025 di Balai Besar POM di Pontianak yaitu:

- a. Melakukan bimbingan teknis kepada pelaku usaha terkait sertifikasi cara produksi yang baik.
- b. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait pengawasan sarana produksi IRTP.
- c. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan.

SK.1.IKSK.9. Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

- a. Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian;





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



- b. Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
- d. Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan.

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Cara Perhitungan

Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = $(A+B+C)/3$

A. Persentase Fasilitas Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Dihitung berdasarkan rata-rata dari Pemenuhan Target Pemeriksaan (a) dan Kesesuaian Tindak lanjut (b).

a) Pemenuhan Target Pemeriksaan





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



Komponen penilaian ini ditunjukkan untuk menilai pemenuhan kuantitas pelaksanaan pemeriksaan oleh UPT = $(A/B) \times 100\%$

A. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang telah diperiksa, ditindaklanjuti, dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT setiap bulan pada tahun berjalan.

B. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan untuk diperiksa, ditindaklanjuti, dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT setiap bulan pada tahun berjalan.

b) Kesesuaian Tindak Lanjut

Komponen penilaian ini ditujukan untuk menilai tingkat kesesuaian antara tindak lanjut yang telah diberikan oleh UPT setiap bulan dibandingkan dengan standar yang berlaku, yaitu Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan, dan SOP Makro Pengawasan = $\{(A/C) + (B/C)\} / 2 \times 100\%$

A. Jumlah total tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang diselesaikan dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT, sesuai standar waktu (*timeline*), pada periode bulan berjalan.

B. Jumlah total laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang dinyatakan sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut oleh *independent supervisor* melalui aplikasi SIPT, pada periode bulan berjalan.





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



- C. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang telah diperiksa, ditindaklanjuti, dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT setiap bulan pada tahun berjalan.
- B. Persentase Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = Rata-rata (a+b+c+d)
- a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = $(\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana} / \text{jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak}) \times 100\%$
 - b. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = $(\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}) \times 100\%$
 - c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = $(\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar} / \text{jumlah sarana yang selesai diperiksa}) \times 100\%$
 - d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = $(\text{Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu} / \text{jumlah seluruh tindak lanjut}) \times 100\%$
- C. Persentase Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = Rata-rata (a+b+c+d)
- a. Pelaksanaan inspeksi = $(\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana} / \text{jumlah target pengawasan sesuai renlak}) \times 100\%$.
 - b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = $(\text{Jumlah sarana}$





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%.

c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%.

d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2025

Tabel 3.1.21. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,13	100	106,24	Sangat Baik

Realisasi indikator kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2025 sebesar 100%. Realisasi ini telah mencapai target triwulan II tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 94,13%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 106,24% sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.1.22. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II 2025 (%)	Realisasi TW Sebelumnya (%)
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	106,24	-

Realisasi indikator kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2025 sebesar 106,24%. Realisasi ini tidak dapat dibandingkan dengan realisasi sebelumnya karena pada triwulan I 2025 belum dilakukan perhitungan untuk indikator ini.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.1.23. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi TW II 2025 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,13	100	106,24	 Tercapai/ Melampaui

Realisasi indikator kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II tahun





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



2025 sebesar 100%. Realisasi ini mencapai target tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu 94,13%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 106,24 % yang termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui**.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Pencapaian target indikator kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Adanya pengawasan *post market* dan pembinaan di sarana pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik (NF) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pengawasan Obat dan Makanan.
- b. Penyesuaian rencana pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi setelah adanya relaksasi anggaran
- c. Monitoring terhadap waktu pelaporan hasil inspeksi dari petugas sampai terkirim ke pusat.
- d. Adanya evaluasi dan monitoring terhadap tindak lanjut yang akan dikirimkan ke stakeholder terkait.
- e. Kompetensi petugas/inspektur yang melaksanakan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan meningkat.

5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2025 di Balai Besar POM di Pontianak yaitu:





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



1. Memberikan sanksi kepada pelaku usaha sesuai dengan ketentuan dalam upaya meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku.
2. Menyampaikan pelaksanaan sanksi Penghentian Sementara Kegiatan (PSK) pada forum komunikasi sarana distribusi, sebagai bentuk komitmen Balai Besar POM di Pontianak dalam melaksanakan ketentuan yang berlaku.
3. Mengoptimalkan koordinasi dan advokasi kepada lintas sektor dalam upaya pembinaan serta pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan.
4. Melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan kegiatan DAK NF BOK POM yang diterima oleh pemerintah daerah.
5. Meningkatkan kompetensi petugas/inspektur terkait pengawasan sarana distribusi secara terus menerus dan berkelanjutan.

SK.1.IKSK.10. Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan.

Sarana yang diperiksa melibatkan beberapa tahapan, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:

- a. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa,
- b. Ketepatan waktu pelaporan, dan





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



c. Kesesuaian tindak lanjut yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan = $\frac{\text{Jumlah Sarana yang Diperiksa Sesuai Ketentuan}}{\text{Jumlah Sarana yang Diperiksa}} \times 100\%$

Keterangan:

- * Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT
- * Jumlah sarana yang diperiksa sesuai ketentuan adalah penjumlahan dari komponen-komponen sebagai berikut: jumlah sarana yang diperiksa sesuai target, ketepatan waktu pelaporan, serta ketepatan tindak lanjut (A+B+C), yaitu:

$A = 20\% \times \left(\frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa}}{\text{target jumlah sarana yang diperiksa sesuai renlak}} \times 100\% \right)$

$B = 70\% \times \left(\frac{\text{Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{jumlah sarana yang diperiksa}} \times 100\% \right)$

$C = 10\% \times \left(\frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu}}{\text{jumlah sarana yang diperiksa}} \times 100\% \right)$

Persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti Sesuai ketentuan = A+B+C





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2025

Tabel 3.1.24. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan Triwulan II Tahun 2025.

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan	85	98,25	110	Sangat Baik

Realisasi indikator kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan pada triwulan II tahun 2025 sebesar 98,25%. Realisasi ini mencapai target triwulan II tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu 85%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 110% yang termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.1.25. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II 2025 (%)	Realisasi TW Sebelumnya (%)
Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan	98,25	100

Realisasi indikator kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan pada triwulan II tahun 2025 sebesar





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



98,25%. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar 1,75% dari realisasi triwulan I 2025 namun masih dapat mencapai target yang ditetapkan.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahunan 2025

Tabel 3.1.26. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi TW II 2025 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan	85,00	98,25	110	 Tercapai/Melampaui

Realisasi indikator kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan pada triwulan II tahun 2025 sebesar 98,25%. Realisasi ini mencapai target tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu 85%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 110% yang termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui**.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Pencapaian target indikator kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan pada triwulan II tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- Ketersediaan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan sarana distribusi Pangan Olahan.
- Meningkatnya kesadaran pelaku usaha distribusi Pangan Olahan dalam memenuhi ketentuan cara peredaran yang baik.





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



- c) Keterlibatan lintas sektor dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan pada triwulan II tahun 2025 di Balai Besar POM di Pontianak, yaitu:

- a) Melakukan koordinasi dengan lintas sektor dalam upaya pembinaan serta pengawasan sarana distribusi Pangan Olahan.
- b) Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait keamanan Pangan Olahan.
- c) Melakukan pengawasan sarana distribusi Pangan Olahan bersama dengan lintas sektor menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

SK.1.IKSK.11. Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan.

Iklan yang diawasi dilaksanakan melalui tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Iklan yang diawasi meliputi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = $(A+B+C+D+E)/5$

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan = $a+b/2$

a: Pemenuhan jumlah target pengawasan

Jumlah iklan yang selesai diawasi/Jumlah target iklan yang diawasi x 100%

B. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = $(a+b) / 2$

Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target / jumlah media (4)

- Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = $(\text{capaian jumlah iklan per media} / \text{jumlah target per media}) \times 100\%$

Keterangan: capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%

Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = $(\text{Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT} + \text{Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat}) / 2$

- Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = $(\text{Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang dievaluasi}) \times 100\%$





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



- Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang dievaluasi}) \times 100\%$

C. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata $(a+b+c)$

Pemenuhan target pengawasan = $(\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi} / \text{jumlah target iklan yang diawasi}) \times 100\%$

Ketepatan waktu pelaporan = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah target iklan yang diawasi}) \times 100\%$

Akurasi pengambilan keputusan = $(\text{Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai} / \text{jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan}) \times 100\%$

D. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata $(a+b+c)$

Pemenuhan target pengawasan = $(\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi} / \text{jumlah target iklan yang diawasi}) \times 100\%$

Ketepatan waktu pelaporan = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah target iklan yang diawasi}) \times 100\%$

Akurasi pengambilan keputusan = $(\text{Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai} / \text{jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan}) \times 100\%$

E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = $(a+b+c)$

Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = $(\text{Jumlah media iklan yang sesuai} / \text{jumlah iklan yang diawasi}) \times 20\%$

Pemenuhan target pengawasan = $(\text{Jumlah iklan yang diawasi} / \text{jumlah target iklan}) \times 40\%$





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/
jumlah iklan yang diawasi) X 40%

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2025

Tabel 3.1.27. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan Triwulan II Tahun 2025.

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	83,3	98,56	110	Sangat Baik

Realisasi indikator kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan pada triwulan II tahun 2025 sebesar 98,56%. Realisasi ini mencapai target triwulan II tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu 83,3%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 110% yang termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.1.28. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II 2025 (%)	Realisasi TW Sebelumnya (%)
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	98,56	98,16

Realisasi indikator kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan pada triwulan II tahun





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



2025 sebesar 98,56%. Capaian realisasi indikator pada TW ini meningkat jika dibandingkan dengan capaian realisasi TW I yaitu 98,16%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahunan 2025

Tabel 3.1.29. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi TW II 2025 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	83,3	98,56	110	 Tercapai/Melampaui

Realisasi indikator kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan pada triwulan II tahun 2025 sebesar 98,56%. Realisasi ini mencapai target tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu 83,3%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 110% yang termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui**.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Pencapaian target indikator kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan pada triwulan II tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1) Peningkatan proporsi iklan yang diawasi pada media elektronik dan media sosial dalam mendukung pelaksanaan efisiensi anggaran.
- 2) Komitmen petugas untuk melakukan evaluasi dan pelaporan iklan tepat waktu dan sesuai pedoman.





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan pada triwulan II tahun 2025 di Balai Besar POM di Pontianak, yaitu:

- a) Melakukan koordinasi dengan Pusat terkait penetapan target kinerja pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan.
- b) Peningkatan kompetensi petugas dalam pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan.
- c) Optimalisasi monitoring kesesuaian proporsi media iklan dan ketepatan waktu pelaporan.





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025





SASARAN KEGIATAN 2

Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi



SK.2.IKSK.1. Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sarana produksi pangan fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar.

Sarana pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindaklanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan).

Indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindaklanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku.

Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung terhadap jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan per jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah UPT dengan menggunakan *baseline* data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2023 yang memiliki nomor izin edar.





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2025

Tabel 3.1.30. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2025.

Indikator Kinerja	Target TW II (%)	Realisasi TW II (%)	Capaian TW II (%)	Kategori
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	20	20	100	Baik

Realisasi indikator kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2025 sebesar 20%. Realisasi ini mencapai target triwulan II tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu 20%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% yang termasuk dalam kategori **Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.1.31. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II 2025 (%)	Realisasi TW Sebelumnya (%)
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	20	-

Realisasi indikator kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2025 sebesar 20%. Realisasi indikator pada triwulan ini





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



tidak dapat dibandingkan dengan realisasi sebelumnya karena pada triwulan I 2025 tidak ada target pemeriksaan sarana produksi fortifikasi.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahunan 2025

Tabel 3.1.32. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi TW II 2025 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60	20	33,33	 Perlu Upaya Keras

Realisasi indikator kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2025 sebesar 20%. Realisasi ini belum mencapai target akhir tahun 2025 yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 60% sehingga termasuk dalam kategori **Perlu Upaya Keras**.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Pencapaian target indikator kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1) Ketersediaan sumber daya anggaran untuk pengawasan sarana produksi fortifikasi.
- 2) Meningkatnya kompetensi petugas dalam melakukan pengawasan produksi fortifikasi.





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



- 3) Adanya monitoring kesesuaian jadwal pelaksanaan pengawasan sarana produksi fortifikasi

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2025 di Balai Besar POM di Pontianak, yaitu:

- a. Pendampingan kepada pelaku usaha UMKM produksi fortifikasi dalam rangka sertifikasi cara produksi pangan olahan yang baik.
- b. Peningkatan kompetensi petugas dalam pengawasan sarana produksi fortifikasi.

**SASARAN KEGIATAN 3**
Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT

SK.3.IKSK.1. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. Balai Besar POM di Pontianak termasuk kategori laboratorium tingkat 3. SKL laboratorium tingkat 3 terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup, Standar Peralatan, Standar Kompetensi Laboratorium, dan Standar Metode yang Terverifikasi.

Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 3 diperoleh dengan rumus = $(50 \% \times a) + (20 \% \times b) + (20 \% \times c) + (10 \% \times d)$





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



- a : Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2
- b : Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2
- c : Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB / Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.
- d : Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB / Balai POM = rata - rata dari nilai standar MA terverifikasi

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2025

Berikut adalah perbandingan antara realisasi pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak terhadap Standar Kemampuan Laboratorium dengan target triwulan II tahun 2025.

Tabel 3.1. 33 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Internal Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72,1	72,4	100,4	Sangat Baik

Realisasi indikator persentase Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada triwulan II sebesar 72,4%.





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



Dibandingkan dengan target triwulan II tahun 2025 capaiannya sebesar 100,4 % termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.1. 34 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II 2025 (%)	Realisasi TW Sebelumnya (%)
Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72,4	70,2

Realisasi indikator kinerja Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Triwulan II sebesar 72,4%, terjadi kenaikan sebesar 2,2 % dibandingkan Triwulan I, capaian ini menunjukkan kinerja yang positif.





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.1. 35 Perbandingan Realisasi Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi TW II 2025 (%)	Capaian (%)	Kategori
Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73,4	72,4	98,63	 Akan Tercapai

Realisasi Indikator Kinerja Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium triwulan II tahun 2025 sebesar 98,63%. Terdapat gap sebesar 1,37% antara realisasi dengan target tahun 2025, dan diharapkan target tahunan **akan tercapai** di akhir tahun.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Capaian Indikator Kinerja Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium termasuk kategori Sangat Baik. Hal ini disebabkan oleh:

- Penyesuaian target RAPK (Rencana Aksi Perjanjian Kinerja) pada triwulan II, sehingga target yang ditetapkan menjadi lebih realistis dan dapat dicapai sesuai kondisi aktual di laboratorium.





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



- b. Komitmen laboratorium obat dalam upaya memenuhi standar kompetensi, meskipun di tengah tingginya volume pengujian sampel rutin.
- c. Upaya dan kerja sama tim pengadaan barang dan jasa, yang meliputi tim teknis, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan PP (Pejabat Pengadaan) dalam mengadakan alat laboratorium, suku cadang dan reagensia.
- d. Monitoring, evaluasi dan pendampingan yang dilaksanakan oleh unit pengampu setiap triwulan berperan penting dalam menjamin ketepatan pengisian *tools* SKL.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian target pemenuhan Indikator Kinerja ini adalah:

- a. Pemantauan yang dilakukan secara rutin memungkinkan untuk mendeteksi kendala atau hambatan secara dini, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengajuan penyesuaian RAPK guna mencapai target.
- b. Melakukan monitoring secara rutin terhadap kemajuan pelaksanaan verifikasi metode analisis agar setiap potensi kendala dapat diidentifikasi dan diatasi sedini mungkin.
- c. Melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan alat laboratorium, suku cadang dan reagensia. Percepatan dilakukan dengan cara pemastian anggaran yang tersedia, penyusunan spesifikasi barang yang akan diadakan, pemastian ketersediaan barang (*ready stock* atau *indent*), serta berkomunikasi secara rutin dengan tim pengadaan barang dan jasa.





LAPORAN KINERJA

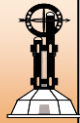
BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



SASARAN KEGIATAN 4

Meningkatnya Efektivitas KIE di Masing-masing



SK.4.IKSK.1. Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media di antaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang.

Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

- Sumber atau Narasumber KIE
- Konten atau Informasi KIE
- Pemahaman Audiens KIE
- Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir.





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



Tabel 3.1.36. Kategori Tingkat Efektivitas KIE

No	Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
1	<65,00	Tidak Efektif
2	65,01 – 75,00	Kurang Efektif
3	75,01 – 85,00	Cukup Efektif
4	85,01 – 95,00	Efektif
5	95,01 – 100	Sangat Efektif

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Triwulan 2 Tahun 2025

Tabel 3.1.37. Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,4	88,52	102,45	Sangat Baik

Indeks Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Triwulan II pada Tahun 2025 sebesar 88,52 masuk dalam kategori **Efektif**. Realisasi Indikator Kinerja Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai Besar POM di Pontianak pada Triwulan II sebesar 88,52 di atas target 86,4 dengan nilai persentase capaian terhadap target yaitu sebesar





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



102,45%. Capaian indikator kinerja ini termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.1.38. Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II 2025	Realisasi TW sebelumnya
Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	88,52	90,35

Realisasi indikator kinerja Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan pada Triwulan II tahun 2025 sebesar 88,52, realisasi ini menurun dibandingkan dengan realisasi Triwulan I yaitu sebesar 1,83. Namun masih dalam kategori yang sama yaitu kategori efektif, dan capaiannya masih masuk dalam kategori **Sangat Baik**.

3) Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.1.39. Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	86,4	88,52	102,45	 Tercapai / Melampaui





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



Realisasi Indikator Kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak tahun 2025 sebesar 88,52 di atas target tahunan 2025 yaitu 86,4, dengan nilai persentase capaian terhadap target sebesar 104,57%. Dengan capaian ini makan indikator kinerja Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui**.

4). Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Penunjang keberhasilan atau penurunan kinerja dalam pencapaian target indikator adalah sebagai berikut :

1. Komitmen lintas sektor dalam mendukung kegiatan KIE Obat dan Makanan,
2. Ragam alternatif media informasi memudahkan masyarakat memperoleh informasi yang cepat dan memadai,
3. Jenis kegiatan penyuluhan, sosialisasi, edukasi dan informasi yang beragam menjangkau berbagai komunitas (masyarakat, pelajar/ mahasiswa, pelaku usaha, asosiasi dan lintas sektor lainnya),
4. Konten informasi terkini, menarik, dan mudah dipahami masyarakat,
5. Tingkat pemahaman, manfaat dan minat masyarakat yang semakin baik terhadap informasi Obat dan Makanan,
6. Pemanfaatan tautan untuk materi KIE yang mudah diakses oleh peserta kegiatan.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



Program kegiatan yang menunjang keberhasilan Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak adalah:

1. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat mengenai Keamanan Pangan di sekolah, desa, dan pasar.
2. Melaksanakan sosialisasi dalam acara AKSELERASI (AKsi SEhari peLayanan publik dan Edukasi masyaRAkat Secara efektif) dengan jangkauan yang lebih luas.
3. Melakukan kegiatan KIE interaktif secara daring melalui media zoom, melalui program Donat Embul (eDukasi Obat dan makanan yang tepAT kEpada Masyarakat setiap BULan) dengan target peserta dan materi yang beragam.
4. Melakukan pengembangan layanan *whatsapp business* SIMPATIK, yaitu dengan menambahkan saluran *whatsapp* "BBPOM Pontianak News" yang berisi tentang informasi Obat dan Makanan.

SK.4.IKSK.2. Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang di dalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

1) Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan II Tahun 2025

Tabel 3.1.40. Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Tahapan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan.

Indikator Kinerja	Target TW II (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	80,00	80,00	100,00	Baik

Realisasi tahap kegiatan dalam Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Tahun 2025 sudah terlaksana 80,00%. Persentase capaian terhadap target sebesar 100%. Capaian indikator kinerja Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan pangan Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.1.41. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahapan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya.

Indikator Kinerja	Realisasi TW II 2025 (%)	Realisasi TW sebelumnya (%)
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	80	10

Realisasi indikator kinerja keberhasilan Tahapan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada Triwulan II tahun 2025 sebesar 80%. Realisasi ini meningkat dibandingkan dengan realisasi Triwulan I yaitu sebesar 70%.





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



3) Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.1.42. Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Tahapan Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Indikator Kinerja	Target Tahunan (Jumlah)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	13	80,00	-	-

Realisasi tahap kegiatan dalam Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Tahun 2025 adalah 80,00%. Tidak dapat diperbandingkan antara target tahunan dengan realisasi TW II karena target tahunan berdasarkan jumlah sekolah, sedangkan realisasi TW berdasarkan tahapan.

4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Penyebab terpenuhinya ekspektasi dalam pencapaian indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

- Terlaksananya advokasi program Prioritas Nasional di Kota Pontianak pada tanggal 30 April 2025 yang dihadiri oleh Plt. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak (Staf Ahli Walikota Pontianak) beserta lintas sektor terkait antara lain Bappeda, DP2KBP3A, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



- b. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan Sekolah di Kota Pontianak pada tanggal 14 Mei 2025 yang melibatkan siswa dan guru sebanyak 68 peserta (kegiatan secara *luring* dan *daring*) di Kota Pontianak.
- c. Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Sekolah di Kota Pontianak pada tanggal 15 Mei 2025 yang melibatkan kepala sekolah dan guru sebagai Tim Keamanan Pangan Sekolah yang berasal dari 6 sekolah yang diintervensi di Kota Pontianak.
- d. Terlaksananya sosialisasi keamanan pangan dalam bentuk konten video yang dibuat oleh sekolah lokus intervensi dan diposting di media sosial BBPOM di Pontianak dan media sosial sekolah.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan pemangku kepentingan pada awal masa peralihan kepemimpinan Walikota Pontianak yang baru.
- b. Petugas proaktif menginisiasi program Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan kepada pemangku kepentingan di Pemerintahan Kota Pontianak.





SK.4.IKSK.3. Jumlah Desa Pangan Aman

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata.

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:

1. kader keamanan pangan desa yang aktif,
2. melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa,
3. mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

1) Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan Tahun 2025

Tabel 3.1.43. Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator Kinerja	Target TW II (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Jumlah Desa Pangan Aman	70,0	70,0	100,00	Baik

Realisasi Indikator Kinerja Tahapan Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025 sebanyak 70% dengan nilai





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



persentase capaian terhadap target sebesar 100%. Nilai ini sama dengan target TW II sebesar 70%. Capaian indikator kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.1.44. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahapan Desa Pangan Aman Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II 2025 (%)	Realisasi TW sebelumnya (%)
Jumlah Desa Pangan Aman	70	10

Realisasi indikator kinerja keberhasilan Tahapan Desa Pangan Aman pada Triwulan II tahun 2025 sebesar 70%. Realisasi ini meningkat dibandingkan dengan realisasi Triwulan I yaitu sebesar 60%.

3) Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.1.45. Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator Kinerja	Target Tahunan (Jumlah)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Jumlah Desa Pangan Aman	4	70	-	-

Realisasi indikator kinerja Tahapan Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025 sebanyak 70%. Tidak dapat diperbandingkan antara target tahunan dengan realisasi TW II karena





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



target tahunan berdasarkan jumlah, sedangkan realisasi TW II berdasarkan tahapan.

4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

- a. Terlaksananya advokasi program Prioritas Nasional di Kota Pontianak pada tanggal 30 April 2025 yang dihadiri oleh Plt. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak (Staf Ahli Walikota Pontianak) serta lintas sektor terkait antara lain Bappeda, DP2KBP3A, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Desa di Kota Pontianak pada tanggal 20 Mei 2025 yang melibatkan Lurah dan aparat kelurahan sebagai Tim Keamanan Pangan Kelurahan serta petugas posyandu, PKK, karang taruna, Kader Pembangunan Manusia dan guru sebagai Kader Keamanan Pangan Kelurahan yang berasal dari 4 kelurahan yang diintervensi di Kota Pontianak.
- c. Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Komunitas Kelurahan di Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota pada tanggal 12 Juni 2025, Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur pada tanggal 19 Juni 2025, Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara pada tanggal 24 Juni 2025 dan Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur pada tanggal 25 Juni 2025 yang melibatkan Tim Keamanan Pangan Kelurahan, Kader Keamanan Pangan Kelurahan serta komunitas kelurahan yang berasal dari kelompok ibu rumah tangga yang memiliki anak *stunting*, ibu menyusui, ibu hamil, remaja putra dan putri berusia 17-21 tahun, guru, siswa, penjaja kantin sekolah, ritel/toko sembako, pelaku usaha pangan siap saji dan pelaku usaha pangan olahan (IRTP).





5) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan Jumlah Desa Pangan Aman di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan pemangku kepentingan pada masa peralihan kepemimpinan Walikota Pontianak yang baru.
- Petugas proaktif menginisiasi program Desa/Kelurahan Pangan Aman kepada pemangku kepentingan di Pemerintahan Kota Pontianak.
- Adanya Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 137 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Penyelenggaraan Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan sebagai acuan bagi pemerintah daerah/kota dalam penyelenggaraan program Desa dan Kelurahan Pangan Aman.

SK.4.IKSK.4. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar dan/atau pelatihan fasilitator pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, pengawasan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya.





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

1) Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.1.46. Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2025.

Indikator Kinerja	Target TW II (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	70,00	70,00	100,00	Baik

Realisasi indikator kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak sebesar 70,00%, dengan nilai persentase capaian terhadap target sebesar 100%. Capaian indikator kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.1.47. Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II 2025 (%)	Realisasi TW sebelumnya (%)





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	70	10
---	----	----

Realisasi indikator kinerja keberhasilan Tahapan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada Triwulan II tahun 2025 sebesar 70,00%. Realisasi ini meningkat dibandingkan dengan realisasi Triwulan I yaitu sebesar 60%.

3) Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.1.48. Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2025.

Indikator Kinerja	Target Tahunan (Jumlah)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	70,00	-	-

Realisasi indikator kinerja Tahapan Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak sebesar 70,00%. Tidak dapat diperbandingkan antara target tahunan dengan realisasi TW II karena target tahunan berdasarkan jumlah, sedangkan realisasi TW II berdasarkan tahapan.

4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

- Terlaksananya advokasi program Prioritas Nasional di Kota Pontianak pada tanggal 30 April 2025 yang dihadiri oleh Plt. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak (Staf Ahli Walikota Pontianak) serta lintas sektor terkait antara lain Bappeda,





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



DP2KBP3A, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- b. Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar di Kota Pontianak pada tanggal 8 Mei 2025 yang melibatkan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Pontianak, pengelola pasar yang diintervensi tahun 2025, pengelola pasar yang pernah diintervensi tahun sebelumnya, dan komunitas pedagang di pasar yang diintervensi.
- c. Untuk penilaian pasar menggunakan form tersendiri dilakukan bersamaan pada kegiatan bimtek dan penyuluhan komunitas pasar. Pada tahun 2025 ini karena efisiensi anggaran kegiatan survei dilakukan bersamaan dengan kegiatan bimtek dan penyuluhan komunitas pasar.
- d. Sosialisasi keamanan pangan dilakukan oleh komunitas pasar seperti pengelola/paguyuban pasar yang telah mengikuti bimtek. Petugas UPT membuat konten keamanan pangan untuk sosialisasi. Konten tersebut terkait pasar pangan aman, keamanan pangan, CEK KLIK dan aplikasi BPOM Mobile/CEK BPOM, *Call Center* BPOM minimal 4 konten per tahun. Konten tersebut diunggah di medsos dan disosialisasikan kepada pengelola/paguyuban pasar yang telah mengikuti bimtek dan penyuluhan.
- e. Tahapan pelaksanaan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas triwulan II sudah sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam Juknis Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Hal ini dikarenakan komunikasi dan integrasi yang baik antara petugas dengan pemerintah Kota Pontianak.

5) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan pemangku kepentingan pada masa peralihan kepemimpinan Walikota Pontianak yang baru.
- b. Petugas proaktif menginisiasi program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas kepada pemangku kepentingan di Pemerintahan Kota Pontianak.





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



SASARAN KEGIATAN 5 **Meningkatnya pendampingan UMKM dalam** **pemenuhan standar keamanan dan mutu**



SK.5.IKSK.1. Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh **Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik** **dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan**

Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan merupakan salah satu indikator kinerja dari sasaran kegiatan meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu di masing masing wilayah kerja UPT.

Sebagai salah satu bentuk keberpihakan Badan POM terhadap UMKM adalah dengan melakukan pendampingan terhadap sarana produksi UMKM agar dapat memenuhi standar. Ruang lingkup UMKM dalam indikator kinerja ini yaitu:

1. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
 - a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:
 - a) UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



- Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
- Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.

b) UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
- UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

Kriteria UMKM yang didampingi sebagai berikut:

A. Untuk UMK Pangan Olahan:

- a) UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.
- b) UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.

B. Untuk UMKM OBA:

- 1) Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



- 2) *Start-up* yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya *start-up* yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
- 3) UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;
- 4) UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- 5) UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan
- 6) UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

C. Untuk UMKM Kosmetik:

- 1) UMKM yang memproduksi kosmetik;
- 2) UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (*start-up*);
- 3) UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan
- 4) UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Pendampingan terhadap UMKM dilakukan melalui beberapa tahapan pendampingan UMKM sebagai berikut:

Jenis Komoditi UMKM	Tahapan Pendampingan
Pangan Olahan	1. KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan 2. Penetapan UMK pangan olahan target 3. Bimtek CPPOB 4. Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB 5. Monev dan Pelaporan





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



Obat Bahan Alam	1. Penetapan target UMKM obat tradisional 2. Bimbingan teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator 3. Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator 4. Sertifikasi 5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kosmetik	1. Penetapan target UMKM Kosmetik 2. Bimbingan teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator 3. Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator 4. Sertifikasi 5. Monev dan Pelaporan

Pada akhir tahun berjalan, indikator kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan, diukur berdasarkan 3 (tiga) komponen sebagai berikut:

$$A = \frac{\text{Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB}}{\text{Jumlah UMK Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{jumlah rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap}}{\text{Jumlah UMKM OBA yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah rekomendasi SPA CPKB}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan = $(A+B+C) / 3$





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2025

Tabel 3.1.49. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target TW II (%)	Realisasi TW II (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan	75	75,83	101,11	Sangat Baik

Realisasi indikator kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan pada Triwulan II tahun 2025 sebesar 75,83%. Realisasi ini mencapai target Triwulan II yang telah ditetapkan yaitu sebesar 75%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 101,11 % sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.1.50. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II 2025 (%)	Realisasi TW Sebelumnya (%)
Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan	75,83	40,42





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



Realisasi indikator kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan pada Triwulan II tahun 2025 sebesar 75,83%. Dibandingkan dengan realisasi Triwulan 1 tahun 2025, terdapat peningkatan realisasi kinerja sebesar 35,41 %

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.1.51. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi TW II 2025 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan	87,3	75,83	-	-

Realisasi tahapan kegiatan indikator kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah 40,42%.

Tidak dapat diperbandingkan antara target tahunan dengan realisasi triwulan II karena target tahunan berdasarkan persentase jumlah UMKM yang memenuhi ketentuan, sedangkan realisasi triwulan II dihitung berdasarkan tahapan pelaksanaan kegiatan pendampingan UMKM.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



Tercapainya target kinerja Triwulan II tahun 2025 dari indikator kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan disebabkan:

- a. Komitmen pelaku usaha di dalam menerapkan Cara Produksi yang Baik serta mengikuti seluruh tahapan pendampingan UMKM.
- b. Sinergi dengan lintas sektor terkait dalam pengembangan UMKM di wilayah Kalimantan Barat, melalui kegiatan FGD Pendampingan UMKM Obat dan Makanan untuk mendapatkan data UMKM yang berkomitmen serta menyelesaikan kendala yang ada selama ini sehingga tidak menjadi hambatan pencapaian kinerja selama tahun berjalan.
- c. Petugas/ fasilitator memiliki kompetensi dalam mendampingi pelaku usaha sehingga tahapan proses pendampingan berjalan sesuai pedoman dan kendala di dalam proses pemenuhan standar dapat diatasi.

Upaya penyempurnaan kinerja ke depan adalah selain tetap berkomitmen dalam mengupayakan kegiatan pendampingan berjalan sesuai dengan tahapannya juga akan dilakukan monitoring tahapan agar sesuai dengan waktu pelaksanaannya.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang terkait dengan capaian kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan di Balai Besar POM di Pontianak yaitu:

- a. Melaksanakan pendampingan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha UMKM dalam rangka sertifikasi sarana produksi yang dilakukan secara komprehensif melalui inovasi AGI JAKK (Aksi Dampingi dan Jangkau UMKM Kalbar).





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



- b. Melaksanakan sosialisasi yang intensif kepada pelaku usaha dan *stakeholder* baik secara langsung maupun melalui *platform* media sosial sehingga meningkatkan pemahaman terkait alur, proses, dan tata cara pendaftaran dan/atau pengajuan dalam rangka pemenuhan cara produksi yang baik dengan inovasi Donat Embul (Edukasi Obat dan Makanan kepada Masyarakat yang Tepat setiap Bulan) dan Akselerasi (Aksi Sehari Pelayanan Publik Kepada Masyarakat yang Efektif).
- c. Melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pendampingan langsung yang intensif antara petugas Balai Besar POM di Pontianak dengan para pelaku usaha dan petugas Pusat (evaluator) untuk penyelesaian masalah yang dihadapi selama proses pendaftaran dan/atau pengajuan dalam rangka memperoleh keputusan/sertifikasi.
- d. Melaksanakan Coaching clinic yang intensif dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti zoom meeting, video call, dan whatsapp business sertifikasi

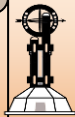




LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



SASARAN KEGIATAN 6 Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT



SK.6.IKSK.1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2025

Tabel 3.1.52. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target TW II (%)	Realisasi TW II (%)	Capaian TW II (%)	Kategori
Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan Makanan	23	26	110	Sangat Baik

Realisasi indikator persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan triwulan II tahun 2025 sebesar 26%. Bila dibandingkan dengan target triwulan II tahun 2025 yaitu 23%, maka capaiannya 110%. Dengan demikian perbandingan realisasi kinerja triwulan II dengan target triwulan II tahun 2025 termasuk kategori **Sangat Baik**.





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.1.53. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II 2025 (%)	Realisasi TW sebelumnya (%)
Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan	26	3

Realisasi indikator kinerja Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan pada Triwulan II tahun 2025 sebesar 26%. Capaian realisasi indikator pada TW ini meningkat jika dibandingkan dengan capaian realisasi TW I yang hanya mencapai 3%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.1.54. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi TW II 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 (%)	Kategori
Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan	91	26	28,57	 Perlu Upaya Keras





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



Realisasi indikator Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan triwulan II tahun 2025 sebesar 26%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 91%, maka capaiannya terhadap target tahun 2025 sebesar 28,57%, sehingga termasuk kategori **Perlu Upaya Keras**. Nilai target tahun 2025 sebesar 91% berupa target proses tahapan penyidikan dalam satu tahun.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Capaian kinerja Persentase Keberhasilan penyidikan Kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan triwulan II terhadap target triwulan II tahun 2025 termasuk kategori **sangat baik**. Hal ini disebabkan karena komitmen dan koordinasi yang baik antara tim penindakan dalam pengungkapan tindak pidana di sediaan farmasi dan pangan olahan dengan pihak-pihak lain seperti Korwas PPNS Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dalam hal pemberian bantuan taktis dan teknis di lapangan, Tim pengujian dalam hal percepatan pengujian barang bukti serta Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dalam hal pemeriksaan dokumen/berkas perkara sampai dengan proses tahap II.

5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program/kegiatan yang dapat mendukung tercapainya target kinerja Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di Balai Besar POM di Pontianak antara lain:

- a) Peningkatan terus menerus/berkelanjutan dalam koordinasi yang lebih baik/efektif dengan unsur-unsur *Criminal Justice System* (Korwas PPNS Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat) dan unsur akademisi (Universitas Tanjungpura) dalam penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana.





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



- b) Meningkatkan kompetensi intelijen, penyidikan, siber dan cegah tangkal kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan personil di Tim penindakan.
- c) Menegaskan peran Balai Besar POM di Pontianak sebagai garda terdepan dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui publikasi informasi penanganan perkara yang dilakukan
- d) Menyusun strategi untuk mengoptimalkan capaian di TW berikutnya dengan adanya relaksasi anggaran terkait penegakan hukum sediaan farmasi dan pangan olahan





SASARAN KEGIATAN 7

Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT



SK.7.IKSK.1. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan

Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan merupakan serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, dan evaluasi data serta informasi yang berkaitan dengan pelanggaran atau tindak pidana di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola kejahatan, memprediksi potensi risiko, dan menyusun strategi penindakan yang lebih efektif. Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu

- a. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejak Digital (*Profiling* Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjualbelikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan *Profiling*) UPT BPOM;
- b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari:

- 1) Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).
- 2) Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

Cara Perhitungan dan formula: Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai dengan standar dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

- a. persentase ketepatan waktu pelaporan analisis penelusuran siber (50%)
- b. persentase nilai kualitas analisis kerawanan sediaan farmasi dan pangan olahan kewilayahan (25%)
- c. persentase tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal oleh UPT (25%)

Keterangan:

- a. persentase ketepatan waktu pelaporan analisis penelusuran siber dihitung dari jumlah analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun
- b. persentase nilai kualitas analisis kerawanan sediaan farmasi dan pangan olahan kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan sediaan farmasi dan pangan olahan dibagi dengan maksimal penilaian analisis
- c. persentase tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti oleh UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2025

Tabel 3.1.55. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2025





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



Indikator Kinerja	Target TW II (%)	Realisasi TW II (%)	Capaian TW II (%)	Kategori
Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100	Baik

Realisasi indikator persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai dengan standar triwulan II tahun 2025 sebesar 50%. Bila dibandingkan dengan target triwulan II tahun 2025 yaitu 50%, maka capaiannya adalah sebesar 100%. Dengan demikian perbandingan realisasi kinerja triwulan II dengan target triwulan II tahun 2025 termasuk kategori **baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.1.56. Perbandingan Realisasi Kinerja persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II 2025 (%)	Realisasi TW sebelumnya (%)
Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	50	50

Realisasi indikator kinerja persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan pada Triwulan II tahun 2025 sebesar 50%. Nilai capaian realisasi TW II ini sama dengan nilai realisasi TW sebelumnya dengan nilai 50%. Nilai 50% ini didapatkan dari pelaporan hasil kegiatan patroli





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



siber dan penjejakan digital (*Profiling* Siber) yang dilaporkan tepat waktu tiap bulannya.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.1.57. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi TW II 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 (%)	Kategori
Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	90	50	55	 Perlu upaya keras

Realisasi indikator persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan triwulan II tahun 2025 sebesar 50%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 90%, maka capaiannya terhadap target tahun 2025 sebesar 55%, sehingga termasuk kategori **Perlu Upaya Keras**.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Capaian kinerja persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai dengan standar triwulan II terhadap target triwulan II tahun 2025 termasuk kategori **baik**. Hal ini disebabkan oleh:





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



- a. Dukungan data dan informasi yang akurat, lengkap dan terkini dari Direktorat Cegah Tangkal dan Siber Badan POM
- b. Kemampuan SDM dalam pengolahan data dan interpretasi terhadap hasil analisis yang diperoleh
- c. Penggunaan sistem informasi pada *dashboard* penindakan dalam mendukung visualisasi tren kejahatan
- d. Kerjasama yang kuat antara Balai Besar POM di Pontianak dengan instansi lain seperti Kepolisian, Kejaksaan Tinggi, Badan Intelijen Daerah, Bea Cukai dan Dinas Kesehatan di Wilayah Kalimantan Barat.
- e. Ketersediaan Alat Khusus (ALSUS) dalam mendukung efektivitas dan akurasi proses investigasi dan pengumpulan informasi dalam penyusunan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan

5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program/kegiatan yang dapat mendukung tercapainya target kinerja persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di Balai Besar POM di Pontianak antara lain:

- a) Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) terkait teknik analisis maupun penggunaan alsus (alat khusus).
- b) Meningkatkan koordinasi secara terus menerus dengan instansi lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan Tinggi, Badan Intelijen Daerah, Bea Cukai dan Dinas Kesehatan di Wilayah Kalimantan Barat.
- c) Melakukan analisis tren dan pola kejahatan serta pemetaan wilayah rawan dan risiko produk secara lebih komprehensif.

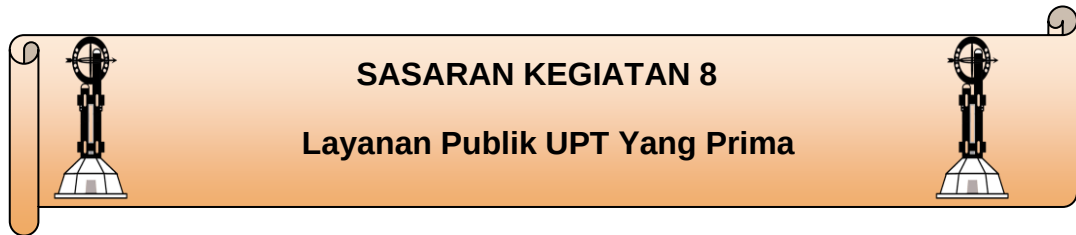




LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



SK.8.IKSK.1. Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Pontianak

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
- 2) Profesionalitas SDM (25%);
- 3) Sarana Prasarana (18%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
- 6) Inovasi (12%).

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).

IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM. Penilaian Indeks Pelayanan Publik dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi.

Nilai Indeks Pelayanan Publik:

75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



Kategori nilai:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



SASARAN STRATEGIS 9 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi Yang Optimal



SK.9.IKSK.1. Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Pontianak

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan *self assessment* dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I.

Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua Komponen) yaitu:

No.	Komponen Pengungkit	Bobot
1.	Manajemen Perubahan	8%
2.	Penataan Tatalaksana	7%
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



5.	Penguatan Pengawasan	15%
6.	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

No.	Komponen hasil	Bobot
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22.5%
2	Pelayanan Publik yang prima	17,5%

Nilai pembangunan ZI Balai Besar POM di Pontianak ditetapkan di akhir tahun 2025.

SK.9.IKSK.2. Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



Cara perhitungan penilaian AKIP yaitu meliputi penjumlahan atas 5 (lima) komponen, yaitu: (1) Perencanaan Kinerja; (2) Pengukuran Kinerja; (3) Pelaporan Kinerja; (4) Evaluasi Kinerja Internal; (5) Capaian Kinerja. Bobot masing-masing komponen sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot
1.	Perencanaan Kinerja	24
2.	Pengukuran Kinerja	24
3.	Pelaporan Kinerja	12
4.	Evaluasi Kinerja Internal	20
5.	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	100

No.	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud <i>good governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (Reform).
2	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	>70-80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



			terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	>50-60	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.
6	C	>30-50	Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
7	D	0-30	Sangat Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak dihitung di akhir tahun 2025.





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



SK.9.IKSK.3. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak

Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas : Capaian RO (bobot 75%)





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



2. Variabel efisiensi : Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Cara perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = (\text{Nilai EKA} \times 50\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 50\%)$$

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak dihitung di akhir tahun 2025.

SK.9.IKSK.4. Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Pontianak

Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan/sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
<i>Risk Naive</i>	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
<i>Risk Aware</i>	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
<i>Risk Defined</i>	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
<i>Risk Managed</i>	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
<i>Risk Enabled</i>	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada di atas batas yang ditetapkan

Indeks manajemen resiko Balai Besar POM di Pontianak ditetapkan di akhir tahun 2025.



LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025

3.1. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI

Pada sub bab ini diuraikan progres tindak lanjut atas poin-poin rekomendasi yang disampaikan pada laporan kinerja triwulan sebelumnya dan rekomendasi periode bersangkutan. Berikut rekomendasi beserta tindak lanjut dari capaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak sampai dengan Triwulan I tahun 2025:

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan Justifikasi
						Selesai *	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
Triwulan IV 2024											
1	Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	83,5	82,98	99,38	Mengoptimalkan peran lintas sektor dalam pengawasan PJAS dan AMIU		Melakukan koordinasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara untuk	TW III 2025	Lintas Sektor belum melakukan pengawasan /pengujian PJAS dan AMIU secara mandiri		

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan Justifikasi
						Selesai *	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
							melakukan pengujian ulang sampel PJAS dan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Landak untuk melakukan pengujian ulang sampel AMIU				

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan Justifikasi
						Selesai *	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
2	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	94	90,06	95,81	Peningkatan Kapasitas tim penindakan		Memberikan pelatihan khusus kepada tim penindakan dalam penanganan perkara yang kompleks	Desember 2025	Sulitnya melakukan penanganan perkara terhadap pelaku kejahatan yang menggunakan platform/media sosial/elektronik		

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan Justifikasi
						Selesai *	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
3	Balai Besar POM di Pontianak				Peningkatan Koordinasi dengan Laboratorium	1. Komunikasi langsung dan rutin dengan pihak laboratorium terkait proses uji agar dapat diprioritaskan telah dilaksa	1. Membentuk komunikasi langsung dan rutin dengan pihak laboratorium terkait proses uji agar dapat diprioritaskan 2. Memastikan semua sampel/bar	Maret 2025	Lambatnya hasil uji yang diterima terkait pembuktian barang bukti tindak kejahatan yang dilakukan pengujian	1. Adanya kesepakatan timeline penyelesaian pengujian laboratorium barang bukti perkara yang ditangani oleh PPNS Balai Besar POM di Pontianak 2. Telah digunakan checklist kelengkapan sesuai prosedur yang	

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan Justifikasi
						Selesai *	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
						nakan.	ang bukti yang akan diuji beserta dokumen yang dibutuhkan sudah diserahkan secara utuh dan lengkap sesuai prosedur yang dipersyaratkan			dipersyaratkan untuk pemastian semua sampel/ barang bukti yang diuji	

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan Justifikasi
						Selesai *	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
4					Penguatan Independensi dan Transparansi Proses Hukum		1. Melakukan publikasi perkembangan perkara yang relevan 2. Memastikan semua prosedur hukum berjalan sesuai aturan 3. Menguran	Maret 2025	Lambatnya proses penyelesaian perkara dikarenakan adanya intervensi dari pihak eksternal		Pelaksanaan diundur dan akan dilaksanakan di TW III tahun 2025

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/Justifikasi
						Selesai *	Belum**			
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian		
							gi celah hukum yang memungkinkan adanya campur tangan pihak eksternal dalam penyelesaian perkara			

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan Justifikasi
						Selesai *	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
5					Peningkatan Akuntabilitas Proses Hukum	2. Telah dilaksanakan permohonan bantuan personil ke Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dalam upaya penegakan	1. Menjaga proses hukum yang sedang dijalankan tetap dijaga akuntabilitasnya sehingga tidak mudah diganggu oleh pihak yang berperkara	Maret 2025	Adanya ancaman terhadap petugas yang dilakukan oleh pihak berperkara sehingga tahapan proses penyelesaian perkara menjadi terhambat	Belum ada intervensi atau hambatan atas proses penyelesaian perkara di BBPOM Pontianak	Poin 1 Akan dilaksanakan di TW II tahun 2025 (checklist kelengkapan administrasi berkas perkara penyidikan, dan surat permohonan bantuan personil)

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan Justifikasi
						Selesai *	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
						hukum.	perlindungan hukum bagi aparat penegak hukum				
6	Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan	87	86,67	99,62	Melakukan pembinaan yang lebih intens kepada anggota SAKA POM untuk bisa menjadi peer educator penyebarlua		Melibatkan SAKA POM dengan lebih rutin pada kegiatan AKSELERASI dan kegiatan KIE	TW IV 2025	Anggota SAKA POM belum bisa mandiri menjadi peer educator penyebarluasan informasi keamanan Obat dan Makanan		



LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan Justifikasi
						Selesai *	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
	Bermutu Balai Besar POM di Pontianak				san informasi keamanan Obat dan Makanan		lainnya				



LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan Justifikasi
						Selesai*	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
7	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	91,25	92,55	101,42	Menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut (RTAL) per jenis layanan atas 3 (tiga) unsur dengan nilai terendah yaitu unsur persyaratan (U1); Sistem, Mekanisme dan Prosedur (U2); serta Waktu		Melakukan pendampingan yang lebih intens terhadap pelaku usaha melalui program AGI JAKK (untuk unsur U1), melakukan publikasi tentang alur registrasi	TW IV 2025	masih terdapat pelaku usaha yang belum memahami pemenuhan persyaratan secara komprehensif, frekuensi publikasi yang kurang intens terkait alur registrasi Obat dan Makanan melalui berbagai media, waktu penyelesaian layanan terkait registrasi Obat		

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan Justifikasi
						Selesai *	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
					Penyelesaian (U3)		Obat dan Makanan melalui berbagai media (unsur U2) dan melakukan pendampingan Tim Sertifikasi mengenai pemenuhan persyaratan yang sudah ditetapkan		dan Makanan yang dirasa oleh pelaku usaha masih lama		



LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/Justifikasi
						Selesai*	Belum**			
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian		
							oleh Badan POM agar layanan dapat diselesaikan lebih cepat (unsur U3)			



LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan Justifikasi
						Selesai*	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
8	Indeks Pelayanan Publik	4,7	4,85	103,19	Pada indikator Profesionalisme SDM direkomendasikan untuk menetapkan SK Kepala UPP mengenai kriteria pemberian penghargaan kepada petugas pelayanan publik yang memuat		Mengimple mentasikan SK Kepala Balai Besar POM di Pontianak mengenai kriteria pemberian penghargaan kepada petugas pelayanan publik yang memuat 6	TW IV 2025	Implementasi yang baru ada berupa pemberian penghargaan kepada petugas pelayanan publik berdasarkan penilaian dari masyarakat melalui E Satisfy Box		



LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan Justifikasi
						Selesai *	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
					unsur Kinerja, Kehadiran, Kerja Sama, Inovatif/Kreatif, Penampilan, dan Tidak Pernah Menerima Komplain dari pengguna layanan yang bersifat personal serta mengimplem		unsur Kinerja, Kehadiran, Kerja Sama, Inovatif/Kreatif, Penampilan, dan Tidak Pernah Menerima Komplain dari pengguna layanan yang bersifat				



LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/Justifikasi
						Selesai *	Belum**			
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian		
					entasiannya dengan bukti kertas kerja yang sesuai kriteria dan dokumentasi pemberian penghargaan		personal dengan bukti kertas kerja yang sesuai kriteria dan mendokumentasikan pemberian penghargaan			
9	Indeks RB Balai Besar POM	87,90	86,41	98,30	Melibatkan semua pegawai untuk melakukan		Mengadakan pertemuan secara berkala	TW I-IV 2025	Pegawai belum memahami secara komprehensif sektor-sektor	Progress TW I Telah dilaksanakan pertemuan terkait

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan Justifikasi
						Selesai *	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
					evaluasi atas rencana kerja pembangunan ZI menuju WBBM		terkait pelaksanaan program/kegiatan, untuk mengevaluasi rencana kerja pembangunan ZI		yang perlu untuk dilakukan perbaikan		evaluasi pelaksanaan rencana kerja pembangunan ZI Pada Triwulan I Tahun 2025

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan Justifikasi
						Selesai *	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
10	Nilai AKIP di Balai Besar POM di Pontianak	83,33	80,65	96,78	Meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi Pelaksanaan penggunaan angaraaan untuk memastikan keselarasan antara perencanaan dengan realisasi pada tahun berjalan dan memiliki dampak		melaksakan monitoring dan evaluasi secara bulanan	Januari s.d Desember 2025	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara triwulan		Progress TW I Telah dilaksanakan pertemuan monitoring dan evaluasi pada bulan Januari s.d Februari 2025 terkait Evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan pelaksanaan anggaran. Telah dilakukan

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan Justifikasi
						Selesai *	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
					terhadap pencapaian kinerja						Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan melalui penyampaian laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran untuk memastikan ketepatan penggunaan anggaran melalui grup whatsapp

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan Justifikasi
						Selesai *	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
											pimpinan dan pengelola keuangan Balai besar POM di Pontianak
11	Indeks Profesionalitas ASN	90,59	88,06	97,21	Memotivasi seluruh pegawai Balai Besar		Pendampingan kepada pegawai	TW I s.d IV 2025	Belum adanya pendampingan kepada pegawai yang akan		

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan Justifikasi
						Selesai *	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
					POM di Pontianak untuk melakukan upgrade pendidikan formal melalui jalur beasiswa		yang akan mengikuti program beasiswa		mengikuti program beasiswa		
12	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	60	59,43	99,05	Memperketat pengadaan produk import		PPK lebih selektif dalam mengidentifikasi kebutuhan pengadaan produk import	TW I s.d IV 2025	Pengadaan seluruh produk import telah disertai analisis kebutuhan sebagai justifikasi yang valid		

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan Justifikasi
						Selesai *	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
Triwulan I 2025											
1	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak	7,5	3	40	Koordinasi dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dan Universitas Tanjungpura di Pontianak		Permohonan optimalisasi bantuan pelaksanaan Digital Forensik	TW III 2025	Lamanya waktu yang diperlukan untuk penerimaan hasil digital forensik dalam penyelesaian perkara tindak kejahatan yang dilakukan secara online		
2	Nilai Pemenuhan	72	70,2	97,5	Penyusunan ulang rencana aksi		Penyusunan ulang rencana	TW IV 2025	Verifikasi metode analisa belum dilaksanakan		

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan Justifikasi
						Selesai *	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
	Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan				pencapaian target pemenuhan laboratorium pengujian sesuai SKL		aksi dalam verifikasi metode analisa				
3	Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium				Memprioritaskan pelaksanaan pengadaan alat laboratorium		Percepatan pelaksanaan pengadaan alat laboratorium tahun 2025	TW IV 2025	Nilai pemenuhan standar laboratorium belum dapat ditingkatkan		

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan Justifikasi
						Selesai *	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
4					Memprioritaskan pelaksanaan pengadaan suku cadang dan reagensia		Percepatan pelaksanaan pengadaan suku cadang dan reagensia tahun 2025	TW III 2025	Pengujian sampel dan verifikasi metode analisa sesuai perencanaan belum sepenuhnya dapat dilakukan		
5	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa	86	0	0	Melakukan percepatan pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi sediaan	Melakukan percepatan pelaksanaan pemeriksaan	Melakukan penyesuaian renlak pemeriksaan sarana produksi sediaan	TW II 2025	Belum adanya sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa	Terdapat sarana produksi sediaan farmasi yang telah diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai	

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan Justifikasi
						Selesai *	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
	dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan				farmasi	saat sarana produksi tersedia farmasi pada TW II 2025	farmasi			ketentuan.	
6	Persentase Laporan Analisis Kejahatan di Bidang sediaan farmasi dan pangan	50	50	100	Optimalisasi sistem pelaporan digital	Melaksanakan seluruh pelaporan menggunakan pelaporan	Melaksanakan seluruh pelaporan menggunakan pelaporan digital (Dashboar	TW II 2025	Pelaporan patroli siber dan profiling masih menggunakan pelaporan secara hardcopy	Pelaporan patroli siber dan profiling telah dilaporkan tepat waktu sebelum tanggal 25 bulan berjalan	

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan Justifikasi
						Selesai *	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
	olahan					digital (Dashb oard Penind akan dan Inaweb crawler)	d Penindaka n dan Inawebcra wler)				



3.1. REALISASI ANGGARAN

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara yang menjelaskan Menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas salah satunya menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Akuntabilitas Keuangan Balai Besar POM di Pontianak tahun 2025 telah dilaporkan melalui Laporan Keuangan, berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.1. Profil Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Triwulan II Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Rp728.580.000	Rp204.803.219	28,11%
2	Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Rp43.550.000	R900.000	2,07%
3		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang	Rp126.860.333	Rp18.493.333	14,58%



LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
		ditindaklanjuti sesuai ketentuan			
4		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Rp126.860.333	Rp18.493.333	14,58%
5		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Rp126.860.333	Rp18.493.333	14,58%
6		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Rp7.281.500	Rp1.669.000	22,92%
7		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Rp7.281.500	Rp1.669.000	22,92%
8		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Rp7.281.500	Rp1.669.000	22,92%
9		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Rp291.020.000	Rp61.077.262	20,99%





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
10		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Rp291.020.000	Rp61.077.262	20,99%
11		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Rp7.281.500	Rp1.669.000	22,92%
12	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Rp4.123.000	Rp510.000	12,37%
13	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Rp11.070.379.000	Rp984.388.074	8,89%
14	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Rp2.994.814.000	Rp439.816.591	14,69%
15		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Rp412.741.000	Rp30.921.050	7,49%
16		Jumlah desa pangan aman	Rp630.324.000	Rp21.209.000	3,36%



LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
17		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Rp142.115.000	Rp9.741.000	6,85%
18	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan	Rp65.789.000	Rp8.530.000	12,97%
19	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Rp610.915.000	Rp119.094.335	19,49%
20	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Rp150.564.000	Rp6.731.500	4,47%
21	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	Rp5.651.538.000	Rp3.698.201.136	58,56%
22	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Rp374.250.000	Rp5.981.908	1,60%
23		Nilai AKIP UPT BPOM	Rp366.250.000	Rp5.981.908	1,63%
24		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Rp5.358.250.000	Rp1.899.459.310	35,45%





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
25		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Rp366.250.000	Rp5.981.908	1,63%
			Rp 29.962.179.000	Rp 7.008.624.82 5	23,39%

Balai Besar POM di Pontianak memperoleh pagu pada DIPA awal sebesar Rp. 30.625.979.000, pada bulan Maret 2025 anggaran Balai Besar POM di Pontianak mengalami pemotongan sehingga anggaran yang tersisa sebanyak Rp. 29.962.179.000. Penyerapan anggaran pada triwulan II tahun 2025 adalah sebesar Rp7.008.624.825,- (23,39%) dari Pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 29.962.179.000,-.

Sampai dengan triwulan II tahun 2025 Balai Besar POM di Pontianak telah melakukan revisi anggaran sebanyak 6 kali dengan rincian 3 kali revisi DJA dan 3 kali revisi POK. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan arahan pemerintah terkait kebijakan efisiensi dan juga menyesuaikan anggaran dengan kegiatan prioritas.

Berbagai upaya yang dilakukan Balai Besar POM di Pontianak dalam pengelolaan dan percepatan penyerapan anggaran antara lain :

1. Mempercepat perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta mengoptimalkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara e-procurement.
2. Konsultasi dan koordinasi tim pengadaan barang dan jasa dengan bimbingan teknis yang kontinyu dari ULP, LKPP, dan instansi lain yang berkaitan.





3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara *intens* setiap kegiatan dan anggaran yang masih berlebih untuk dialokasikan ke kegiatan yang masih memerlukan anggaran

Secara keseluruhannya sasaran kegiatan dapat dilaksanakan dengan efisien dan target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak untuk meningkatkan efisiensi anggaran adalah :

1. Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Balai Besar POM di Pontianak.
2. Perencanaan program dan kegiatan yang jelas, terukur, dan berdasarkan skala prioritas.
3. Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan dan pertanggungjawaban selalu akuntabel.
4. Memperkuat pengendalian internal melalui monitoring dan evaluasi kegiatan secara rutin, sehingga tersedia informasi yang memadai untuk mengantisipasi dan mengatasi kendala yang dihadapi pada saat itu.
5. Menyesuaikan kegiatan sesuai dengan kondisi efisiensi, misalnya pengalihan anggaran KIE secara tatap muka menjadi secara daring.

A. Efisiensi Dan Efektifitas

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{Capaian Output}}{\% \text{Capaian Input}}$$





Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembandingan yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang dapat diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} \text{SE} &= \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \\ &= \frac{100\%}{100\%} = 1 \end{aligned}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau Kurang Efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$\text{TE} = \frac{IE - SE}{SE}$$





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



Pada triwulan I tahun 2025, 9 (sembilan) sasaran kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Pontianak berdasarkan capaian output kegiatan dan capaian realisasi anggaran serta berdasarkan hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (TE) diperoleh data sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

TABEL EFISIENSI TRIWULAN II TAHUN 2025 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PONTIANAK										
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	Persentase Capaian	Normalisasi	Capaian per Sasaran Kegiatan	RPD TW II	Realisasi TW II	Persentase Capaian	IE = C/CICI (IE-4)/1
1. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Obat dan wilayah kerja UPT	1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,75%	99,07%	114,20%	110%	106,80%	Rp377.345.653	Rp204.803.219	54,27%	2,1
	2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah mengajukan KT/ESD	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!		Rp1.800.000	Rp300.000	50,00%	#DIV/0!
	3. Persentase sampel Pangan Obat berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00%	98,54%	115,93%	110%		Rp62.888.067	Rp18.493.333	29,41%	3,9
	4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%		Rp62.888.067	Rp18.493.333	29,41%	0
	5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00%	90,69%	106,69%	106,69%		Rp62.888.067	Rp18.493.333	29,41%	3,6
	6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Obat yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	38,00%	40,45%	106,45%	106,45%		Rp1.165.000	Rp1.669.000	143,26%	1
	7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,00%	100,00%	116,28%	110%		Rp1.165.000	Rp1.669.000	143,26%	1
	8. Persentase sarana produksi Pangan Obat yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00%	93,33%	109,80%	109,80%		Rp1.165.000	Rp1.669.000	143,26%	1
	9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,13%	100,00%	106,24%	106,24%		Rp55.660.050	Rp61.077.262	109,73%	1,0
	10. Persentase sarana distribusi Pangan Obat yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00%	98,25%	115,59%	110%		Rp55.660.050	Rp61.077.262	109,73%	1,1
	11. Persentase Alan sediaan farmasi dan pangan obat yang diawasi sesuai ketentuan	83,30%	98,56%	118,32%	110%		Rp1.165.000	Rp1.669.000	143,26%	1
2. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan (Fortifikasi)	12. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	20	20	100,00%	100,00%	100,00%	Rp340.000	Rp510.000	150,00%	1
3. Meningkatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Obat dan wilayah kerja UPT	13. Nilai pemenuhan Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Obat dan wilayah kerja UPT	72,1	72,4	100,42%	100,42%	100,42%	Rp634.577.000	Rp64.388.074	117,951%	1
4. Meningkatnya efektivitas KLB di masing-masing wilayah kerja UPT	14. Tingkat efektivitas KLB Sediaan Farmasi dan Pangan Obat di wilayah kerja UPT	88,4	88,52	102,45%	102,45%	106,91%	Rp62.890.000	Rp439.816.591	66,368%	1,5
	15. Jumlah sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan pangan	80	80	100,00%	100,00%		Rp47.771.050	Rp30.921.050	64,73%	1,5
	16. Jumlah desa pangan aman	70	70	100,00%	100,00%		Rp56.129.000	Rp21.208.000	37,796%	2,6
	17. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	70	70	100,00%	100,00%		Rp12.770.000	Rp9.741.000	76,280%	1,3
5. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat case pembuatan CBA, KSA yang baik dan terakreditasi IPPPOB pangan obat	75,00%	75,83%	101,11%	101,11%	101,11%	Rp7.040.000	Rp8.530.000	121,16%	1
6. Terlaksananya Penindakan Kejadian Sediaan Farmasi dan Pangan Obat yang efektif di wilayah kerja UPT	19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejadian Sediaan Farmasi dan Pangan Obat di UPT	23,00%	25,00%	113,04%	110%	110%	Rp150.400.790	Rp119.094.335	79,18%	1,4
7. Terlaksananya kegiatan pemeriksaan kesehatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Obat yang efektif di wilayah kerja UPT	20. Persentase Laporan Analisis Kejadian Sediaan Farmasi dan Pangan Obat yang ditindaklanjuti sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Rp8.841.500	Rp6.731.500	76,14%	1,3
8. Layanan Publik UPT yang prima	21. Indeks Pelayanan Publik UPT yang prima	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!		Rp3.777.039.343	Rp3.698.201.136	97,91%	#DIV/0!
9. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Unit Organisasi yang optimal	22. Nilai Pembangunan 21 UPT BPOM	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!		Rp13.567.390	Rp5.981.908	44,09%	#DIV/0!
	23. Nilai AKIP UPT BPOM	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Rp13.567.390	Rp5.981.908	44,09%	#DIV/0!
	24. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!		Rp2.112.582.780	Rp1.899.459.310	89,91%	#DIV/0!
	25. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0,00%	99,75%	#DIV/0!	#DIV/0!		Rp13.567.390	Rp5.981.908	44,09%	#DIV/0!
RATA-RATA					105,16%	105,16%	Rp8.394.673.587	Rp7.626.561.461	91%	1,16
									91%	0,16





Berdasarkan analisis efisiensi kegiatan, Indeks Efisiensi seluruh indikator kinerja kegiatan berada indeks efisiensi rerata (IE) 1,16 dan Tingkat Efisiensi rerata (TE) 0,16. Suatu capaian sasaran kegiatan dikatakan efisien apabila nilai $IE \geq 1,00$. Dari nilai IE tersebut, Balai Besar POM di Pontianak berhasil melaksanakan sasaran kegiatan dengan **Efisien** dengan Tingkat Efisien **100%**. Namun secara umum tingkat efisiensi pada Balai Besar POM di Pontianak belum dapat disimpulkan efisien secara keseluruhan karena beberapa indikator akan dilakukan penilaian pada akhir tahun dan juga target anggaran yang ditetapkan tidak per triwulan melainkan per tahun.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak untuk meningkatkan efisiensi anggaran adalah :

1. Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Balai Besar POM di Pontianak.
2. Perencanaan program dan kegiatan yang jelas, terukur, dan berdasarkan skala prioritas.
3. Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan dan pertanggungjawaban selalu akuntabel.
4. Memperkuat pengendalian internal melalui monitoring dan evaluasi kegiatan secara rutin, sehingga tersedia informasi yang memadai untuk mengantisipasi dan mengatasi kendala yang dihadapi pada saat itu.
5. Menyesuaikan kegiatan sesuai dengan kondisi terkini, misalnya pengalihan anggaran KIE secara tatap muka menjadi secara daring.

Dalam hal ini tingkat efisiensi adalah bersifat relatif artinya indikator kegiatan yang dinyatakan efisien dalam buku ini dapat berubah menjadi Kurang Efisien setelah dievaluasi / diaudit oleh pihak lain begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara *output* dan *input* yang hanya berupa dana. Kedepan pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan *input* lainnya dengan dukungan data yang lebih memadai.





3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA LOKA POM KABUPATEN SAMBAS

INDIKATOR KINERJA		TARGET BULANAN	REALISASI JUNI	CAPAIAN TERHADAP TARGET BULAN N
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.50	100.00	124.22
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75.00	98.18	130.91
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100.00	100.00	100.00
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75.00	100.00	133.33
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	42.00	37.84	90.10
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.50	100.00	110.50
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78.00	100.00	128.21
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90.50	99.50	109.94
1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	81.44	82.58	101.40
1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPOB pangan olahan	59.80	65.00	108.70
1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	55.00	0.00	0.00
1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50.00	41.67	83.34
1	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-
4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-
5	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	50.00	50.00	100.00
6	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar	55.00	54.55	99.18
7	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	92.00	75.00	81.52





1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.50	100	124,22	Tidak dapat disimpulkan

Target indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas tahun 2025 adalah 80,50%. Dari total target 86 sampel sediaan farmasi telah disampling sebanyak 30 sampel sediaan farmasi (Obat, Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika) yang disampling secara targeted dan diuji sesuai pedoman sampling tahun 2025. Realisasi indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh Loka POM di Kabupaten Sambas periode Juni 2025 adalah 100,00%. Persentase Capaian realisasi indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas Tahun 2025 dibandingkan dengan target tahun 2025 adalah 124,22%.

Kendala : adanya efisiensi di awal tahun menyebabkan jumlah target sampel menjadi berkurang sehingga memudahkan petugas dalam mencapai target nilai 100%. Oleh karena itu, Loka POM di Kabupaten Sambas perlu melakukan adjustment target, dengan meningkatkan nilai target capaian.

Tindak lanjut : Loka POM di Kabupaten Sambas sudah mengajukan perubahan target tahun 2025 dari 80,50% menjadi 91,00%. Perubahan target sudah disetujui oleh pusat. Dengan adanya perubahan target ini maka pencapaian target kinerja dapat tercapai dengan sangat baik.





2. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	98,18	130,91	Tidak dapat disimpulkan

Target indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas tahun 2025 adalah 75,00%. Dari total target 33 sampel Pangan Olahan telah disampling sebanyak 10 sampel pangan olahan yang disampling secara targeted dan diuji sesuai pedoman sampling tahun 2025. Realisasi indikator Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh Loka POM di Kabupaten Sambas periode Juni 2025 adalah 98,18%. Persentase Capaian realisasi indikator Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas Tahun 2025 dibandingkan dengan target tahun 2025 adalah 130,91%.

Kendala : adanya efisiensi di awal tahun menyebabkan jumlah target sampel menjadi berkurang sehingga memudahkan petugas dalam mencapai target nilai 100%. Oleh karena itu, Loka POM di Kabupaten Sambas perlu melakukan adjustment target, dengan meningkatkan nilai target capaian.

Tindak lanjut : Loka POM di Kabupaten Sambas sudah mengajukan perubahan target tahun 2025 dari 75,00% menjadi 91,00%. Perubahan target sudah disetujui oleh pusat. Dengan adanya perubahan target ini maka pencapaian target kinerja dapat tercapai dengan sangat baik.





3. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	Baik

Target indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas tahun 2025 di TW II adalah 100 %. Pada periode TW 2 tahun 2025 tidak ada terjadi kasus kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan (NIHIL) sehingga tidak dilakukan sampling produk pangan. Namun BPOM Loka Sambas tetap terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga dapat bertindak secara sigap dan melakukan langkah yang diperlukan ketika terjadi KLB Keracunan pangan dan terus mengawasi perkembangan sesuai dengan laporan masyarakat.

4. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	93,3	124,4	Tidak dapat disimpulkan

Target indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas tahun 2025 adalah 75,00%. Dari total target 3 sampel PIRT telah disampling sebanyak 3 sampel PIRT yang disampling secara targeted dan diuji sesuai pedoman sampling tahun 2025.





Realisasi indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh Loka POM di Kabupaten Sambas periode Juni 2025 adalah 93,3%. Persentase Capaian realisasi indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas Tahun 2025 dibandingkan dengan target tahun 2025 adalah 124,4%.

Kendala : adanya efisiensi di awal tahun menyebabkan jumlah target sampel menjadi berkurang sehingga memudahkan petugas dalam mencapai target nilai 100%. Oleh karena itu, Loka POM di Kabupaten Sambas perlu melakukan adjustment target, dengan meningkatkan nilai target capaian.

Tindak lanjut : Loka POM di Kabupaten Sambas sudah mengajukan perubahan target tahun 2025 dari 75,00% menjadi 91,00%. Perubahan target sudah disetujui oleh pusat. Dengan adanya perubahan target ini maka pencapaian target kinerja dapat tercapai dengan sangat baik.

5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	42.00	37.84	90.10	Baik

Target indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder pada TW II adalah 42,00%, namun yang sudah terealisasi sebesar 37,84%, sehingga capaian realisasi indikator ini pada TW II adalah 90,10%. Terhadap 37 rekomendasi hasil pengawasan yang dikeluarkan oleh Loka POM





Kabupaten Sambas, baru 14 rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.

Kendala : Loka POM di Kabupaten Sambas sudah melakukan komunikasi dan koordinasi ke Pelaku usaha (penanggung jawab sarana) yang belum menindaklanjuti hasil pemeriksaan (belum menyusun CAPA). Pelaku usaha kurang aktif dalam menindaklanjuti membuat surat tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Sambas.

Tindak lanjut : Loka POM di Kabupaten Sambas akan mengintensifkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Lembaga Profesi Ikatan Apoteker Indonesia guna mendorong pelaku usaha (penanggung jawab) untuk dapat segera menyusun tindak lanjut (CAPA). Loka POM di Kabupaten Sambas juga akan terus memberikan *reminder* serta memberikan bimbingan penyusunan tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA) kepada pelaku usaha yang diharapkan akan membantu agar pelaku usaha dapat mengirimkan surat tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan Loka POM di Kabupaten Sambas.

6. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.50	100	110.50	Tidak dapat disimpulkan

Target indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten





Sambas TW II tahun 2025 adalah 90,50%. Dari total target 63 sampel fasilitas distribusi Sediaan Farmasi, telah diperiksa sebanyak 16 sarana. Realisasi indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas tahun 2025 adalah 100,00%. Persentase Capaian realisasi indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas Tahun 2025 dibandingkan dengan target tahun 2025 adalah 110,50%.

Kendala : adanya efisiensi di awal tahun menyebabkan jumlah target fasilitas distribusi farmasi yang diperiksa menjadi berkurang sehingga memudahkan petugas dalam mencapai target nilai 100%. Oleh karena itu, Loka POM di Kabupaten Sambas perlu melakukan adjustment target, dengan meningkatkan nilai target capaian.

Tindak lanjut : Loka POM di Kabupaten Sambas sudah mengajukan perubahan target tahun 2025 dari 90,50% menjadi 94,25%. Perubahan target sudah disetujui oleh pusat.

Dengan adanya perubahan target ini maka pencapaian target kinerja dapat tercapai dengan sangat baik.

7. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78.00	100.00	128.21	Tidak dapat disimpulkan





Target indikator Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW II tahun 2025 adalah 78,00%. Dari total target 22 sarana distribusi pangan olahan, telah diperiksa sebanyak 8 sarana. Realisasi indikator Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas periode Juni tahun 2025 adalah 100,00%. Persentase Capaian realisasi indikator Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas Tahun 2025 dibandingkan dengan target tahun 2025 adalah 128,21%.

Kendala : adanya efisiensi di awal tahun menyebabkan jumlah target distribusi pangan olahan yang diperiksa menjadi berkurang sehingga memudahkan petugas dalam mencapai target nilai 100%. Oleh karena itu, Loka POM di Kabupaten Sambas perlu melakukan adjustment target, dengan meningkatkan nilai target capaian.

Tindak lanjut : Loka POM di Kabupaten Sambas sudah mengajukan perubahan target tahun 2025 dari 78,00% menjadi 91,00%. Perubahan target sudah disetujui oleh pusat. Dengan adanya perubahan target ini maka pencapaian target kinerja dapat tercapai dengan sangat baik.

8. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90.50	99.50	109.94	Sangat Baik





Target indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW II tahun 2025 adalah 90,50%. Dari total 254 target iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang harus diawasi, 128 iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang telah dilakukan pengawasan sampai dengan Juni 2025. Realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sampai dengan Juni 2025 adalah 99,50%. Capaian realisasi untuk indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan adalah 109,94%.

9. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	81.44	82.58	101.40	Sangat Baik

Target indikator Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW II tahun 2025 adalah 81,44. Dari total pelaksanaan kegiatan KIE yang dilakukan hingga TW II tahun 2025, hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat efektivitas yang dicapai adalah 82,58. Dengan demikian, Capaian realisasi indikator Persentase Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Sambas Tahun 2024 mencapai 101,40.

10. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan





INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	59.80	65.00	108.70	Sangat Baik

Target indikator persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Loka POM di Kabupaten Sambas sampai dengan TW II Tahun 2025 adalah 59,80%. Persentase realisasi indikator persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan hingga TW II Tahun 2025 adalah sebesar 65,00%. Sehingga realisasi capaian indikator tersebut terhadap target Loka POM di Kabupaten Sambas di Tahun 2025 adalah sebesar 108,70%.

11. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	55.00	0	0	Kurang





Target indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW II Tahun 2025 adalah 55%. Persentase realisasi indikator Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Loka POM di Kabupaten Sambas hingga TW II Tahun 2025 masih 0%. Sehingga capaian indikator tersebut terhadap target Loka POM di Kabupaten Sambas Tahun 2025 adalah sebesar 0%.

Kendala:

1. Dikarenakan adanya efisiensi anggaran, Pada Triwulan I target perkara Loka POM di Kabupaten Sambas diturunkan dari 1 menjadi 0 (nol) Perkara, sehingga Loka POM di Kabupaten Sambas di sepanjang TW I Tahun 2025 tidak melakukan kegiatan penindakan. Kegiatan penindakan baru dapat dimulai pada bulan April 2025 setelah dilakukan relaksasi anggaran.
2. Tim Penindakan Loka POM Sambas masih melakukan pendalaman informasi untuk menemukan target perkara tahun 2025. Loka POM di Kabupaten Sambas menngedepankan pembinaan sarana terlebih dahulu.

Tindak Lanjut:

1. Loka POM di Kabupaten Sambas akan mengintensifkan upaya pencarian target perkara yang berfokus pada wilayah dalam kota dengan tetap mengedepankan pembinaan.
2. Akan mengoptimalkan koordinasi dengan tim penindakan BBPOM di Pontianak, dan Aparat Penegak Hukum di wilayah Kabupaten Sambas terkait penanganan tindak pidana di bidang obat dan makanan
3. Mengintensifkan kegiatan intelijen dan operasi penindakan untuk mengungkap tindak pidana di bidang obat dan makanan guna memenuhi target perkara tahun ini.





12. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50.00	41.67	83.34	Cukup

Target indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar di Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW II tahun 2025 adalah 50%. Persentase realisasi indikator Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar di Loka POM di Kabupaten Sambas hingga TW II tahun 2025 adalah 41.67%. Sehingga capaian indikator tersebut terhadap target Loka POM di Kabupaten Sambas hingga TW II Tahun 2025 adalah sebesar 83.34%

Kendala: Loka POM di Kabupaten Sambas sudah melaporkan laporan patroli siber dan laporan profiling siber periode April-Juni 2025 secara tepat waktu. Namun capaian tetap di bawah target karena Loka POM di Kabupaten Sambas pernah terlambat mengirimkan laporan profiling siber ke pusat pada periode bulan Februari dan Maret 2025. Hal ini berimplikasi pada capaian di periode triwulan selanjutnya, karena capaian bersifat akumulatif.

Tindak Lanjut: Tim Penindakan Loka POM di Kabupaten Sambas akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan agar pelaporan siber dan analisis kejahatan dapat terselesaikan tepat waktu.





13. Indeks Pelayanan Publik UPT

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-

Pengukuran Indeks Pelayanan Publik Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW II tahun 2025 belum dilakukan. Pengukuran ini akan dilakukan di TW IV bersamaan dengan UPT BPOM di seluruh Indonesia dengan menunggu jadwal dari pengampu program yaitu Biro Hukum dan Organisasi BPOM.

14. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	-

Pengukuran Indeks Pelayanan Publik Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW II tahun 2025 belum dilakukan. Pengukuran ini akan dilakukan di TW IV bersamaan dengan UPT BPOM di seluruh Indonesia dengan menunggu jadwal dari pengampu program yaitu Inspektorat BPOM.

15. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	50.00	50.00	100.00	Baik





Target Indikator Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW II Tahun 2025 adalah 50,00%.

Realisasi indikator

Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Loka POM di Kabupaten Sambas TW II tahun 2025 adalah 50,00%. Persentase Capaian realisasi indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas TW II Tahun 2025 dibandingkan dengan target TW II tahun 2025 adalah 100,00%.

16. Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar	55.00	54.55	99.18	Baik

Target Indikator Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Loka POM di Kabupaten Sambas sesuai standar pada TW II Tahun 2025 adalah 55,00%. Persentase Realisasi Indikator Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Loka POM di Kabupaten Sambas sesuai standar hingga TW II Tahun 2025 adalah 54,55 %. Pemenuhan Dokumen SAKIP Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW II sebanyak 6 dari 11 dokumen yang meliputi PK, RAPK, Laporan Capaian RAPK TW IV tahun 2024 dan TW I tahun 2025 dan Laporan kinerja TW IV Tahun 2024 dan laporan evaluasi internal TW I tahun 2025. Sehingga realisasi capaian indikator tersebut terhadap Target Loka POM di Kabupaten Sambas hingga TW II Tahun 2025 adalah sebesar 99,18 %.





17. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	92.00	75.00	81.52	Cukup

Target indikator Persentase Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT Loka POM di Kabupaten Sambas TW II Tahun 2025 adalah 92,00 %. Dari total pelaksanaan tingkat efisiensi penggunaan anggaran UPT yang dilakukan hingga TW II Tahun 2025, realisasi indikator tingkat efisiensi penggunaan anggaran UPT adalah 75.00. Persentase realisasi capaian indikator efisiensi penggunaan anggaran UPT terhadap target Loka POM di Kabupaten Sambas di Tahun 2025 adalah sebesar 81,52%.

Kendala:

Adanya efisiensi anggaran pada Triwulan I mengakibatkan sebagian besar anggaran diblokir dan target rincian output diturunkan. Kemudian di April 2025, pemerintah menetapkan kebijakan relaksasi anggaran, yang mana anggaran pemeriksaan, sampling dan pengujian serta penindakan dibuka kembali, serta target-targetnya dikembalikan ke jumlah awal. Adanya dinamika pemblokiran dan relaksasi anggaran menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran dan pemenuhan target Loka POM di Kabupaten Sambas hingga TW 2 Tahun 2025.

Tindak Lanjut :

Loka POM di Kabupaten Sambas akan mengoptimalkan pelaksanaan pemeriksaan sarana, sampling, kegiatan penindakan, melakukan kegiatan ke luar kota sehingga target penyerapan anggaran dan pencapaian target output Loka POM di Kabupaten Sambas dapat tercapai di periode triwulan berikutnya.





BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Pontianak ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Pontianak selama triwulan II tahun 2025 dalam rangka melaksanakan Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan, selain itu laporan kinerja ini juga dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dalam menentukan rencana perbaikan dan juga pengoptimalan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya, penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar POM di Pontianak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Strategis Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025-2029 memiliki Program Pengawasan Obat dan Makanan yang terdiri dari 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan yang dijabarkan dalam 25 (dua puluh lima) Indikator. Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2025 Balai Besar POM di Pontianak menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak triwulan II tahun 2025. Capaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak triwulan II tahun 2025 secara keseluruhan memperoleh kategori **Istimewa** dengan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) **105,18%**.





Dari dokumen Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2025, Balai Besar POM di Pontianak memperoleh capaian kinerja indikator sebagai berikut:

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 114,20% **(110%)** kategori **Sangat Baik**,
2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 115,93% **(110%)** kategori **Sangat Baik**,
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar, tidak masuk dalam perhitungan TW II karena tidak ada sampel KLB,
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **106,69%** kategori **Sangat Baik**,
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, dengan capaian **106,45%** kategori **Sangat Baik**,
7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 116,28% **(110%)** kategori **Sangat Baik**,
8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **109,80%** kategori **Sangat Baik**,
9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **106,24%** kategori **Sangat Baik**,
10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 115,59% **(110%)** kategori **Sangat Baik**,





11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, dengan capaian 118,32% **(110%)** kategori **Sangat Baik**,
12. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,
13. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, dengan capaian **100,42%** kategori **Sangat Baik**,
14. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, dengan capaian **102,45%** kategori **Sangat Baik**,
15. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,
16. Jumlah desa pangan aman, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,
17. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,
18. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan, dengan capaian **101,11%** kategori **Sangat Baik**,
19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT, dengan capaian 113,04% **(110%)** kategori **Sangat Baik**,
20. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,
21. Indeks Pelayanan Publik UPT, penilaian dilakukan pada akhir tahun,





22. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
23. Nilai AKIP UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
24. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
25. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun.

Pada bulan Maret 2025 anggaran Balai Besar POM di Pontianak mengalami pemotongan sehingga anggaran yang tersisa sebanyak Rp. 29.962.179.000 dari anggaran awal sebesar Rp. 30.625.979.000. Penyerapan anggaran pada triwulan II tahun 2025 adalah sebesar Rp7,008,624,825,- (**23,39%**) dari Pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 29.962.179.000,-.

Demikian Laporan Kinerja Interim Triwulan II Balai Besar POM di Pontianak tahun 2025 dengan harapan dapat bermanfaat bagi publik dan pihak-pihak yang berkepentingan. Penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Balai Besar POM di Pontianak kepada Badan POM RI, disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak juga sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di triwulan mendatang.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak triwulan II tahun 2025 perlu dirumuskan beberapa langkah sebagai strategi untuk meningkatkan capaian sasaran kegiatan, antara lain:

1. Meningkatkan kompetensi personil secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.





2. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang terintegrasi dengan ISO 17025:2017 secara konsisten.
3. Berkomitmen dalam penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 yang telah tersertifikasi tahun 2023 dengan konsisten.
4. Meningkatkan pemenuhan standar kemampuan laboratorium dan pengelolaan data dan informasi, dalam rangka penguatan laboratorium, serta melaksanakan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.
5. Mengintensifkan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha dengan mengedepankan aspek persuasif sehingga pelaku usaha dengan penuh kesadaran melaksanakan GMP (Good Manufacturing Practices) maupun GDP (Good Distribution Practices).
6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian kinerja, sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan target dan indikator kinerja dengan capaian tidak dapat disimpulkan.
7. Mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi pada semua bisnis proses untuk mengintegrasikan data, terutama dalam pengumpulan data kinerja (bulanan, triwulan) secara berjenjang sampai ke level individu sehingga diperoleh database kinerja yang realtime, akuntabel dan mempermudah evaluasi oleh pimpinan.
8. Meningkatkan peran *Agent of Change* (AoC) dan Tim Reformasi Birokrasi dalam penerapan Reformasi Birokrasi di Balai Besar POM di Pontianak untuk mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).





9. Meningkatkan implementasi SAKIP di lingkungan Balai Besar POM di Pontianak secara konsisten dan berkelanjutan.
10. Mengembangkan inovasi dan secara konsisten menerapkannya untuk peningkatan kualitas pengawasan dan pelayanan publik, serta mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja.
11. Mengoptimalkan koordinasi dan advokasi kepada pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Program DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan dalam melakukan pembinaan serta pengawasan sarana produksi dan distribusi serta pelayanan kefarmasian di masing-masing kabupaten/kota penerima DAK Non Fisik.
12. Meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan memperluas jejaring dengan stakeholder dan Criminal Justice System (CJS) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang Obat dan Makanan.
13. Meningkatkan penggalangan pencegahan kejahatan Obat dan Makanan yang bertujuan untuk menggalang pemangku kepentingan dalam rangka intervensi pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, antara lain melalui Focus Group Discussion (FGD), inisiasi Perjanjian Kerja Sama (PKS/MoU)
14. Pelaksanaan survei KIE dalam rangka mengetahui tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan tidak hanya dilakukan dalam KIE pemberdayaan masyarakat namun dilakukan juga dalam Program Prioritas Nasional.
15. Meningkatkan penyebaran informasi yang *up to date* secara intensif melalui berbagai media cetak dan elektronik, termasuk melalui platform media sosial.
16. Mendorong komunitas desa, pasar, dan sekolah untuk melaksanakan rencana aksi yang telah dibuat sebagai





komitmen dalam menjaga konsistensi penerapan keamanan pangan secara mandiri.

17. Meningkatkan pelayanan pendampingan kepada pelaku usaha UMKM untuk mendukung pertumbuhan usaha dalam suatu ekosistem digital yang dibangun bersama seluruh stakeholders.





LAMPIRAN


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI PONTIANAK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAUZI FERDIANSYAH

Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Pontianak

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, 12 Februari 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar POM di
Pontianak


FAUZI FERDIANSYAH

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan RI


TARUNA IKRAR





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.75 %
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 %
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 %
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 %
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 %
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	96.4 %
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86 %
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 %
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94.13 %
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 %





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83.3 %
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60 %
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73.4 %
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.4 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	13 Sekolah
		03 - Jumlah desa pangan aman	4 Desa
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	87.3 %
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91 %
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 %
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7 Nilai





LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

TRIWULAN II 2025



NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	81,15 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 30,625,979,000 (Tiga Puluh Miliar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	19,426,816,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	11,199,163,000

Pontianak, 12 Februari 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar POM di
Pontianak

FAUZI FERDIANSYAH

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan RI

TARUNA IKRAR

